

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022



BAGIAN ORGANISASI SETDA

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr Wb,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban terkait dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Meskipun tahun 2022 masih dalam kondisi Pandemic Covid-19, Pemerintah Kabupaten Muara Enim tetap berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 dapat memberikan manfaat dan menjadi potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 serta menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Muara Enim, Maret 2023

Pt. **BUPATI MUARA ENIM**
WAKIL BUPATI,

AHMAD USMARWI KAFAH, S.H.,LL.M.,LL.M.,Ph.D

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2022 untuk peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai misi dan tujuan yaitu menjadi 3 tujuan dan 15 sasaran dengan 20 indikator sasaran dari semula untuk mewujudkan visi ditetapkan dengan 7 misi, 9 tujuan, 20 sasaran dengan 42 indikator sasaran.

Dari penyesuaian tersebut pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran diketahui bahwa 5 indikator sasaran sangat baik, 13 indikator sasaran Baik, 1 indikator sasaran Cukup, dan 1 indikator sasaran Kurang. Rata – rata realisasi capaian kinerja mencapai 96,74 Persen atau bermakna **Baik**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 berada dalam kategori **Baik**.

Hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2022 tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Muara Enim	2
1.3. Sistematika Penyusunan LKjIP	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	22
3.2. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim	23
3.3. Analisis Capaian Kinerja	25
3.4. Realisasi Anggaran	62
3.5. Efisiensi Penggunaan Anggaran	74
BAB IV PENUTUP	77
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Muara Enim	3
Tabel 1.2.	Urusan Pemerintahan	6
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Kabupaten Muara Enim Tahun 2022	15
Tabel 2.2.	Program Pendukung Pencapaian Tujuan/ Sasaran Tahun 2022	16
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022	24
Tabel 3.3.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1	25
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja IPM Tahun 2018 - 2022	26
Tabel 3.5.	Komponen Penyusun IPM Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 - 2022	27
Tabel 3.6.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2	28
Tabel 3.7.	Persentase Perempuan Berumur 14 - 19 Tahun Yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir 2017-2021	29
Tabel 3.8.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3	30
Tabel 3.9.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4.....	33
Tabel 3.10.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5	35
Tabel 3.11.	Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 - 2022	37
Tabel 3.12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2020 - 2022	38
Tabel 3.13.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6.....	39
Tabel 3.14.	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 - 2022	39
Tabel 3.15.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7	42
Tabel 3.16.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8	46
Tabel 3.17.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 - 2021	47
Tabel 3.18.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9	49
Tabel 3.19.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10	51
Tabel 3.20.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11	53
Tabel 3.21.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12	56
Tabel 3.22.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13	56
Tabel 3.23.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14	59
Tabel 3.24.	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15	60
Tabel 3.25.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Strategis	62

	Hal
Tabel 3.26. Laporan Realisasi Anggaran (Konsolidasi) Pemerintah Kabupaten Muara Enim	71
Tabel 3.27. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2022	74

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 3.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muara Enim, Sumsel dan Nasional Tahun 2018 - 2022.....	26
Gambar 3.2	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim, Sumsel, Nasional Tahun 2018 - 2022	31
Gambar 3.3	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim, Provinsi dan Nasional Tahun 2018 - 2022	32
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muara Enim 2018 - 2022	36
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumsel 2018 - 2022	40

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muara Enim, Maret 2023

INSPEKTUR KABUPATEN MUARA ENIM



SUHERMANSYAH, S.T., M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720820 200501 1 004

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan yang baik menuju tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapatkan dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Dari sisi penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja Pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu alat penilai keberhasilan atau kegagalan kinerja yang merupakan wujud transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu LKjIP juga bermanfaat bagi evaluasi internal sebagai umpan balik atau *feedback* dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi pada tahun-tahun yang akan datang.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan tersebut, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan Pemerintahan tahun keempat dari lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2022 merupakan pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah dan menjadi bahan penting dalam proses evaluasi internal organisasi serta merupakan informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang hasil kerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim di tahun 2022.

1.2. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

1.2.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

A. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Letak Geografis Kabupaten Muara Enim antara 103° 18' 18" – 104° 42' 4,99" Bujur Timur dan 3° 3' 21" – 4° 15' 14" Lintang Selatan. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.486,21 km², secara administratif terdiri dari 22 kecamatan, 246 desa definitif, dan 10 kelurahan. Wilayah kabupaten Muara Enim terletak di tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Lahat; dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Prabumulih.

Jarak terjauh dari Ibu Kota Kabupaten Muara Enim ke Ibu Kota Kecamatan adalah Kecamatan Muara Belida yaitu sejauh 160 km. Diikuti oleh Kecamatan Lubai Ulu yaitu sejauh 151 km, Sungai Rotan sejauh 150 km, dan Kecamatan Belida Darat sejauh 128 km. Sementara yang terdekat adalah Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul, dan Ujan Mas.

Kecamatan dengan wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Gelumbang dengan luas wilayah 705,57 Km² atau 9,42 persen dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Lembak dengan luas wilayah 101,44 Km² atau 1,35 persen dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim. Jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Gelumbang dengan jumlah 23 desa/kelurahan dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Benakat dengan jumlah 6 desa.

Tabel 1.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Muara Enim

No	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Persentase thd Luas Kab.	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Semende Darat Laut	269,14	3,60	10
2	Semende Darat Ulu	426,64	5,70	10
3	Semende Darat Tengah	302,24	4,04	12
4	Tanjung Agung	517,10	6,91	14
5	Rambang	378,07	5,05	13
6	Lubai	529,32	7,07	10
7	Lawang Kidul	287,26	3,84	7
8	Muara Enim	187,08	2,50	16
9	Ujan Mas	311,33	4,16	9
10	Gunung Megang	471,36	6,30	13
11	Benakat	451,96	6,04	6
12	Rambang Niru	638,35	8,53	16
13	Gelumbang	705,57	9,42	23
14	Lembak	101,44	1,35	10
15	Sungai Rotan	344,14	4,60	19
16	Muara Belida	204,67	2,73	8
17	Kelekar	138,03	1,84	7
18	Belimbing	148,69	1,99	10
19	Belida Darat	264,26	3,53	10

No	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Persentase thd Luas Kab.	Jumlah Desa/ Kelurahan
20	Lubai Ulu	478,49	6,39	11
21	Panang Enim	192,92	2,58	12
22	Empat Petulai Dangku	138,35	1,85	10
Total		7.486,21	100	256

Sumber : BPS Muara Enim, 2022

B. Kondisi Topografi

Keadaan permukaan tanah di daerah Kabupaten Muara Enim cukup beragam. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang meliputi Kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Semende Darat Laut, dan Kecamatan Tanjung Agung. Sedangkan daerah dataran rendah terletak di daerah bagian tengah dan daerah rawa terdapat di daerah yang berhadapan langsung dengan aliran Sungai Musi yang meliputi Kecamatan Lembak, Gelumbang, dan Sungai Rotan.

Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Muara Enim sebagian kecamatan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan, dengan cakupan luas mencapai 3.733,25 km² atau 50,56 persen dari luas Kabupaten Muara Enim. Terdapat 11 (sebelas) Kecamatan lainnya berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (m dpl), dengan cakupan luas mencapai 3.650,65 km² atau 49,44 persen dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim.

C. Kondisi Demografi

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Muara Enim merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar).

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 dari proyeksi hasil sensus penduduk tahun 2020 (September) berjumlah sekitar 624.019 orang. Pada tahun 2021 jumlah penduduk wilayah ini dihuni oleh sekitar 617.846 orang. Dengan demikian selama kurun waktu 2021 - 2022 terjadi pertumbuhan sebesar 1,00 persen per tahun.

Persebaran penduduk menurut Kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Muara Enim yang dihuni oleh sekitar 75,90 ribu penduduk. Sementara Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Muara Belida dengan jumlah penduduk sekitar 7,98 ribu jiwa.

1.2.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah sebagai daerah otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muara Enim yaitu menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Muara Enim. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan urusan wajib dan pilihan yaitu :

Tabel 1.2
Urusan Pemerintahan

URUSAN WAJIB	
A	URUSAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1. Pendidikan
	2. Kesehatan
	3. Pekerjaan Umum
	4. Penataan Ruang
	5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	7. Sosial
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
	1. Ketenagakerjaan
	2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Pangan
	4. Pertanahan
	5. Lingkungan Hidup
	6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	9. Perhubungan
	10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12. Penanaman Modal	
13. Kepemudaan dan Olahraga	
14. Statistik	
15. Persandian	
16. Kebudayaan	
17. Perpustakaan dan	
18. Kearsipan	
B	URUSAN PILIHAN
	1. Kelautan dan Perikanan
	2. Pariwisata
	3. Pertanian
	4. Perdagangan
	5. Perindustrian
	6. Transmigrasi

C. Kelembagaan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adapun susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah Kabupaten
2	Inspektorat Daerah Kabupaten
3	Sekretariat DPRD kabupaten
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pendapatan Daerah
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Dinas Lingkungan Hidup
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Dinas Sosial
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
7	Dinas Perikanan
8	Dinas Perkebunan
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Satuan Polisi Pamong Praja
22	Dinas Ketahanan Pangan
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
26	RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim

No.	Perangkat Daerah
1	Kecamatan Semende Darat Ulu
2	Kecamatan Semende Darat Tengah
3	Kecamatan Semende Darat Laut
4	Kecamatan Tanjung Agung
5	Kecamatan Lawang Kidul
6	Kecamatan Muara Enim
7	Kecamatan Ujanmas
8	Kecamatan Gunung Megang
9	Kecamatan Rambang Niru
10	Kecamatan Sungai Rotan
11	Kecamatan Gelumbang
12	Kecamatan Lembak
13	Kecamatan Lubai
14	Kecamatan Rambang
15	Kecamatan Benakat
16	Kecamatan Muara Belida
17	Kecamatan Kelekar
18	Kecamatan Lubai Ulu
19	Kecamatan Belimbing
20	Kecamatan Belida Darat
21	Kecamatan Empat Petulai Dangku
22	Kecamatan Panang Enim

D. APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim per 31 Desember 2022 berjumlah 6352 dengan rincian sebagai berikut :

a) Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Ruang	CPNS	PNS	Jumlah
1	IV	0	1518	1518
2	III	77	3991	4068
3	II	169	585	754
4	I	0	12	12
Jumlah		246	6106	6352

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

b) Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	CPNS	PNS	Jumlah
1	S-3 / Doktor	0	0	0
2	S-2 / Pasca Sarjana	15	495	510

No	Tingkat Pendidikan	CPNS	PNS	Jumlah
3	S-1 / Sarjana	62	3699	3761
4	Diploma IV	0	100	100
5	Diploma I/ II/ III	169	1165	1334
6	SLTA	0	614	614
7	SLTP	0	26	26
8	SD	0	7	7
Jumlah				6352

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Muara Enim
- 1.3. Sistematika Penyusunan LKjIP

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022
- 3.2. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim
- 3.3. Analisis Capaian Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran
- 3.5. Efisiensi Penggunaan Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan perencanaan kinerja Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 - 2023.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 VISI

Berdasarkan kondisi Kabupaten Muara Enim dewasa ini, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta isu strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun, Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim menetapkan visi Kabupaten Muara Enim tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

**"Muara Enim Untuk Rakyat Yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat
Dan Sejahtera"**

Penjelasan dari visi sebagai berikut :

- **AGAMIS** adalah kondisi dimana di seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatannya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan selalu dalam Bimbingan, Lindungan dan Ridho Allah SWT.
- **BERDAYA SAING** adalah kondisi dimana pemerintahan kabupaten dan masyarakat memiliki kemampuan dan keunggulan untuk memenangi kompetisi di segala bidang.
- **MANDIRI** adalah dimana pemerintahan kabupaten dan masyarakat memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menuju tujuan hakiki dari otonomi daerah.
- **SEHAT** adalah seluruh lapisan masyarakat memiliki badan, jiwa dan sosial yang baik yang memungkinkan hidupnya produktif secara sosial dan ekonomi.
- **SEJAHTERA** adalah dimana seluruh masyarakat seluruh kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan) dapat terpenuhi secara mudah, adil dan merata.

2.1.2 MISI

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri;
Diarahkan kepada peningkatan keimanan, ketaqwaan serta kerukunan antar umat beragama dengan menjamin kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban. Selain itu diarahkan kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan serta akses teknologi informasi dan komunikasi masyarakat.

2. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan duafa, dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri;
Dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan sosial masyarakat yaitu anak yatim, yatim piatu dan duafa serta keluarga miskin dengan peningkatan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari garis kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, serta peningkatan kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan;
Diarahkan pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor unggulan daerah yang ditandai oleh terciptanya lingkungan usaha yang produktif sehingga meningkatkan iklim investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan utama masyarakat dengan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat (konsumsi) dan mencukupi ketersediaan pangan utama masyarakat (produksi).
4. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya;
Diarahkan pada peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dengan meningkatnya pemenuhan sarana dan prasana pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan, serta diarahkan pada peningkatan Angka Harapan Hidup dengan meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan melalui peningkatan akses kesehatan.
5. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya Jalan TOL Muara Enim–Indralaya-Palembang;
Diarahkan pada meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas melalui peningkatan kualitas jalan kabupaten, peningkatan infrastruktur untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan lumbung pangan, penyediaan sarana telekomunikasi untuk

memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat sehingga meningkatkan antar wilayah.

6. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan;

Dimaksudkan untuk peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam lingkungan yang tersedia secara berkelanjutan dengan meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam bagi masyarakat, meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan meningkatkan kualitas lingkungan.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Diarahkan pada penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan/pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan efektivitas penggunaan sistem informasi daerah serta peningkatan pelaksanaan inovasi daerah.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka peningkatan dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai misi dan tujuan yaitu menjadi 3 Tujuan dan 15 Sasaran dengan 20 indikator, yaitu sebagai berikut :

Tujuan kesatu menunjang Sasaran Misi Kesatu, Ketiga, Keempat dan Kelima :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan

3. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya
4. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya Jalan TOL Muara Enim–Indralaya-Palembang

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
3.	Meningkanya Kualitas Pendidikan	- Angka Harapan Lama Sekolah - Rata-Rata Lama sekolah
4.	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	Pengeluaran Perkapita

Tujuan Kedua menunjang Sasaran Misi Kedua dan keenam :

1. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan duafa, dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri
2. Memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini Rasio 3. PDRB Perkapita
2.	Menurunnya Masyarakat Miskin	Persentase Penduduk Miskin

Tujuan Ketiga menunjang Sasaran Misi Ketujuh :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik	- Indeks Pelayanan Publik - Indeks Inovasi Daerah

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator
3.	Meningkatnya Kualitas Keuangan	Opini BPK
4.	Meningkatnya Sumberdaya Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur
5.	Meningkatnya Pengawasan Aparatur	Tingkat Maturitas SPIP
6.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Penghargaan Pembangunan Daerah
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	- Nilai SAKIP - Nilai LPPD
8.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE
9.	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	% Peraturan Perundang-undangan yang harmonis

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 setelah dilakukan penyesuaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target 2022
1.	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	69,32
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,32
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	- Angka Harapan Lama Sekolah	12,00
		- Rata-Rata Lama Sekolah	8,40
4.	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	Tingkat Daya Beli Masyarakat	Rp. 10,95 juta
5.	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,29
		Indeks Gini Ratio	0,31
		PDRB Perkapita	Rp. 120 juta
6.	Menurunnya Masyarakat Maskin	Persentase Penduduk Miskin	10,92
7.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	B

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target 2022
8.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	B
		Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Terinovatif
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP
10.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur	57
11.	Menguatnya Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	3,02
12.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Penghargaan Pembangunan Daerah	Nominasi
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB
		Nilai LPPD	Prestasi Tinggi
14.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,95
15.	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis	100

Proses pencapaian tujuan/ sasaran pada tahun 2022 didukung oleh program-program sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program Pendukung Pencapaian Tujuan/ Sasaran Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program pengelolaan pendidikan	155.393.724.299
2.	Program pendidik dan tenaga kependidikan	33.453.338.276
3.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	153.693.007.401
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	17.399.392.321
5.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	812.957.898
6.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	601.013.359
7.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	50.274.078.545
8.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	6.575.397.249
9.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	7.951.297.656
10.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	13.098.220.840
11.	Program pengembangan permukiman	1.005.781.446
12.	Program penataan bangunan gedung	11.325.080.775
13.	Program penataan bangunan dan lingkungannya	470.377.974
14.	Program penyelenggaraan jalan	190.502.306.490
15.	Program pengembangan jasa konstruksi	239.367.446
16.	Program penyelenggaraan penataan ruang	5.169.802.992
17.	Program pengembangan perumahan	3.600.564.336

No	Program	Anggaran (Rp.)
18.	Program kawasan permukiman	14.929.088.626
19.	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (Psu)	25.736.336.873
20.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	5.997.674.483
21.	Program penanggulangan bencana	3.257.873.788
22.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	4.564.548.923
23.	Program pemberdayaan sosial	12.336.741.922
24.	Program rehabilitasi sosial	883.788.456
25.	Program perlindungan dan jaminan sosial	1.001.186.728
26.	Program penanganan bencana	695.920.642
27.	Program pengelolaan taman makam pahlawan	105.625.452
28.	Program perencanaan tenaga kerja	105.848.215
29.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.392.303.232
30.	Program penempatan tenaga kerja	476.348.825
31.	Program hubungan industrial	359.960.886
32.	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	454.026.173
33.	Program perlindungan perempuan	169.888.108
34.	Program peningkatan kualitas keluarga	72.158.610
35.	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	259.195.360
36.	Program pemenuhan hak anak (PHA)	712.162.260
37.	Program perlindungan khusus anak	339.237.603
38.	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1.072.073.396
39.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.681.542.972
40.	Program penanganan kerawanan pangan	465.264.383
41.	Program pengawasan keamanan pangan	316.769.648
42.	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	207.359.388
43.	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	10.237.366.298
44.	Program pengelolaan tanah kosong	44.421.635
45.	Program penatagunaan tanah	76.331.873
46.	Program perencanaan lingkungan hidup	514.086.272
47.	Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	1.283.356.202
48.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	312.943.900
49.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan	147.048.930

No	Program	Anggaran (Rp.)
	berbahaya dan beracun (Limbah B3)	
50.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	178.874.606
51.	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (Mha), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	63.412.300
52.	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	228.386.400
53.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	227.713.600
54.	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	190.154.362
55.	Program pengelolaan persampahan	5.500.347.926
56.	Program pendaftaran penduduk	1.351.868.234
57.	Program pencatatan sipil	518.229.500
58.	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	595.462.642
59.	Program pengelolaan profil kependudukan	187.722.000
60.	Program penataan desa	13.632.638.264
61.	Program peningkatan kerjasama desa	220.269.440
62.	Program administrasi pemerintah desa	4.220.107.220
63.	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	4.051.154.313
64.	Program pengendalian penduduk	1.043.100.381
65.	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	3.391.373.148
66.	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	2.373.164.564
67.	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	3.650.349.738
68.	Program informasi dan komunikasi publik	8.371.031.632
69.	Program aplikasi informatika	4.820.139.833
70.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	76.309.000
71.	Program penilaian kesehatan ksp/ usp koperasi	80.060.300
72.	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	594.198.802
73.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	1.476.513.672
74.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	1.490.249.009
75.	Program pengembangan UMKM	887.559.604

No	Program	Anggaran (Rp.)
76.	Program pengembangan iklim penanaman modal	1.142.803.868
77.	Program promosi penanaman modal	857.014.007
78.	Program pelayanan penanaman modal	885.915.225
79.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	403.427.283
80.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	683.900.061
81.	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	4.574.980.849
82.	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	11.632.791.614
83.	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	560.987.688
84.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	265.945.291
85.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	316.355.294
86.	Program pengembangan kebudayaan	525.000.000
87.	Program pengembangan kesenian tradisional	650.000.000
88.	Program pembinaan sejarah	175.000.000
89.	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	365.000.000
90.	Program pembinaan perpustakaan	1.930.184.113
91.	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	111.483.786
92.	Program pengelolaan arsip	559.647.454
93.	Program pengelolaan perikanan tangkap	718.125.548
94.	Program pengelolaan perikanan budidaya	2.981.866.736
95.	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	1.435.046.901
96.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.601.500.000
97.	Program pemasaran pariwisata	505.000.000
98.	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	595.000.000
99.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	485.000.000
100.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	10.188.942.680
101.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	7.824.515.007
102.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1.189.769.505
103.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	593.074.575

No	Program	Anggaran (Rp.)
104.	Program perizinan usaha pertanian	67.127.285
105.	Program penyuluh pertanian	4.496.020.795
106.	Program pengelolaan energi baru terbarukan	296.338.911
107.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	9.652.096.547
108.	Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	684.420.695
109.	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	250.000.000
110.	Program perencanaan dan pembangunan industri	302.141.000
111.	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	297.859.000
112.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	14.689.088.118
113.	Program perekonomian dan pembangunan	5.195.977.239
114.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	32.839.612.565
115.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.893.431.424
116.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	4.286.705.178
117.	Program pengelolaan keuangan daerah	440.808.352.499
118.	Program pengelolaan barang milik daerah	4.204.054.616
119.	Program pengelolaan pendapatan daerah	5.673.294.852
120.	Program kepegawaian daerah	5.508.493.710
121.	Program pengembangan sumber daya manusia	6.793.886.313
122.	Program penelitian dan pengembangan daerah	2.711.579.360
123.	Program penyelenggaraan pengawasan	2.329.764.690
124.	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	458.855.754
125.	Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	7.793.745.553
126.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	9.478.636.493
127.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	133.020.908
128.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.599.462.286
129.	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	282.777.403
130.	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.987.268.244

No	Program	Anggaran (Rp.)
131.	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.005.145.882
132.	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	612.777.009
133.	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	907.533.221

Jumlah program sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga program) dan anggaran sebesar Rp. 1.426.192.324.790,- (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022. Pengukuran kinerja ini merupakan penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022. Tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

1. Pengumpulan Data

Untuk tahun 2022 dilakukan pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan pengumpulan data yang diperoleh dari dua sumber yaitu secara internal yang berasal dari pelaporan masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim dan secara eksternal yang berasal dari luar instansi atau lintas sektoral yaitu dari BPS.

2. Analisa Data

Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun penghitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

- 2.1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- 2.2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan digunakan skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN KINERJA
1.	≥ 100%	Sangat Baik
2.	76 % ≥ 100 %	Baik
3.	56 % ≥ 75 %	Cukup
4.	≤ 55 %	Kurang

3.2. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pada tahun 2022 merupakan tahun ke empat RPJMD Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dalam rangka peningkatan dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai misi dan tujuan yaitu menjadi 3 Tujuan dan 15 Sasaran dengan 20 indikator. Rumusan terhadap 7 misi, 3 tujuan, 15 sasaran, dengan 20 indikator kinerja utama sasaran tersebut kemudian dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Muara Enim Tahun 2022, dengan penjelasan :

- Tujuan 1 menunjang Misi I, III, IV dan V, terdapat 4 tujuan/ sasaran dan 5 indikator kinerja;
- Tujuan 2 menunjang Misi II dan VI, terdapat 2 tujuan/ sasaran, dan 4 indikator kinerja;
- Tujuan 3 menunjang Misi VII, terdapat 9 tujuan/ sasaran, dan 11 indikator kinerja;

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 adalah gambaran dari tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	69,32	69,43	100,15	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2. Angka Harapan Hidup	69,32	69,38	100	Baik
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan	3. Angka Harapan Lama Sekolah	12,00	11,99	99,92	Baik
		4. Rata-rata Lama Sekolah	8,40	7,90	94,04	Baik
4.	Meningkatnya standar kelayakan hidup masyarakat	5. Tingkat Daya Beli Masyarakat	Rp. 10,95 juta	Rp. 10,99*	100,36	Sangat Baik
5.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,29	8,39	133,39	Sangat Baik
		7. Indeks Gini Ratio	0,31	0,34*	91,18	Baik
		8. PDRB Perkapita	Rp. 120 juta	Rp. 181 juta	150,83	Sangat Baik
6.	Menurunnya masyarakat miskin	9. Persentase Penduduk Miskin	10,92	11,12	98,20	Baik
7.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan	10. Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100	Baik
8.	Meningkatnya pelayanan publik	11. Indeks Pelayanan Publik	B	A -	105,13	Sangat Baik
		12. Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten terinovatif	Inovatif	75	Cukup
9.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	13. Opini BPK	WTP	WTP*	100	Baik
10.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	14. Indeks Profesionalitas Aparatur	57	53,26	93,44	Baik
11.	Menguatnya penguasaan	15. Tingkat Maturitas SPIP	3,02	2,856	94,57	Baik
12.	Meningkatnya kualitas perencanaan	16. Penghargaan Pembangunan Daerah	Nominasi	Tidak masuk nominasi	75	Kurang
13.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	17. Nilai SAKIP	BB	BB	100	Baik
		18. Nilai LPPD	Prestasi Tinggi	Prestasi Tinggi*	100	Baik
14.	Meningkatnya	19. Indeks SPBE	2,95	2,91	98,64	Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
	sistem pemerintahan berbasis elektronik					
15.	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	20. Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Harmonis	100	100	100	Baik

* Data tahun sebelumnya

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 20 indikator sasaran, diketahui bahwa 5 indikator sasaran Sangat Baik, 13 indikator sasaran Baik, 1 indikator sasaran Cukup, 1 Indikator sasaran Kurang. Rata – rata realisasi capaian kinerja mencapai 96,74 Persen atau bermakna **Baik**, Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 berada dalam kategori **Baik**.

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.3.1. Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,09	68,86	99,66	69,32	69,43	100,15	69,55	69,43	99,83
Rata – rata capaian kinerja				99,66			100,15			99,83

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator sasaran Indeks Pembangunan Manusia telah melebihi target yang ditetapkan ditahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 100,15 persen dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan 2018-2023 telah tercapai 99,83 persen.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

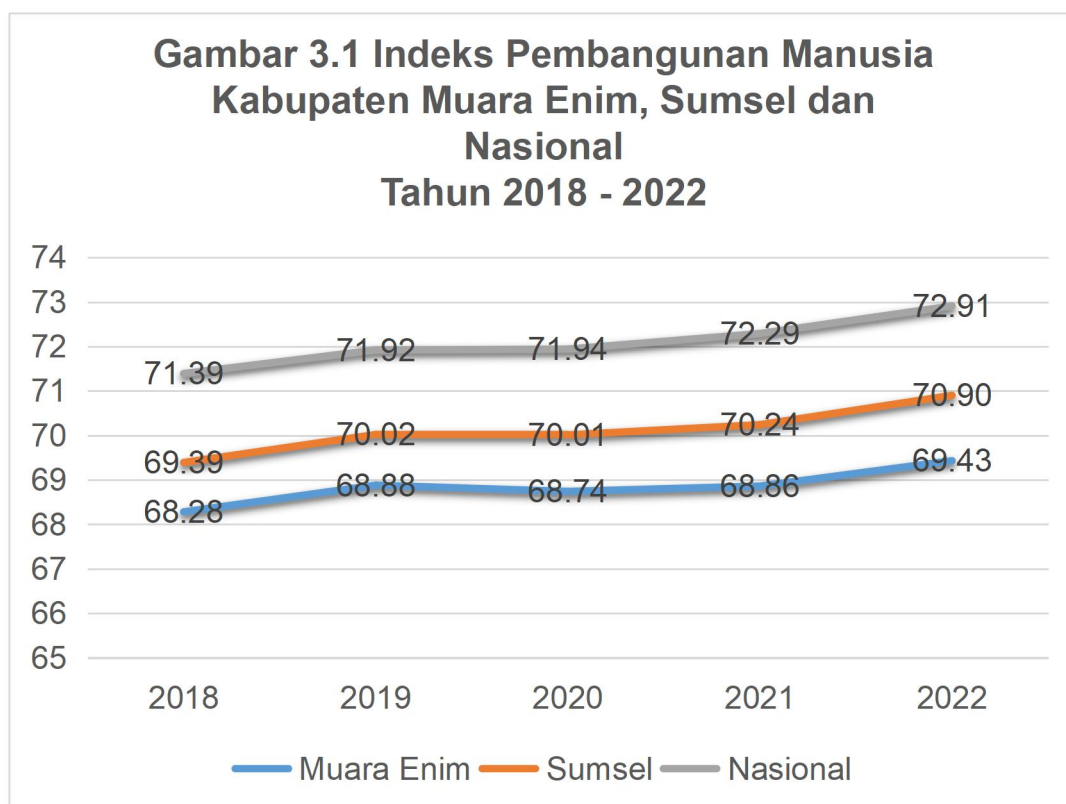
Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja IPM 2018 - 2022

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia	68,28	68,88	68,74	68,86	69,43

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2022

IPM dibagi menjadi 4 kategori atau golongan yaitu IPM rendah jika < 60 , sedang $60 \leq \text{IPM} \leq 70$, tinggi $70 \leq \text{IPM} \leq 80$, dan ≥ 80 sangat tinggi. IPM Kabupaten Muara Enim tahun 2022 masuk dalam kategori sedang. IPM Kabupaten Muara Enim cenderung meningkat setiap tahun, IPM tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar 69,43 atau naik sebesar 0,57 poin.

Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan, capaian IPM Kabupaten Muara Enim tahun 2022 masih berada dibawah IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70,90 serta dibawah IPM Nasional sebesar 72,91.



Sumber : Diolah dari data BPS 2023

IPM dihitung dengan metode baru sejak tahun 2010. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Tabel 3.5
Komponen Penyusun IPM Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 - 2022

No	IPM	Satuan	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,63	68,90	69,02	69,38
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,78	7,79	7,80	7,9
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,96	11,97	11,98	11,9
4.	Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	11,012	10,951	10,99	10,99*
	IPM	%	68,88	68,74	68,86	69,43

Sumber : BPS Provinsi Sumsel, 2023

Pada tahun 2022 terdapat peningkatan nilai semua komponen penyusun dibandingkan dengan tahun 2021 yang mendorong peningkatan IPM sebesar 0,57 poin. Peningkatan nilai komponen penyusun yang cukup signifikan menunjukkan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan pada setiap komponen penyusun IPM memiliki pengaruh positif pada peningkatan IPM dan telah berada pada arah yang tepat.

Beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan, program pengendalian perizinan pendidikan, program pengembangan bahasa dan sastra, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, program pengembangan kapasitas kepramukaan, program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

3.3.2. Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018 - 2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,13	69,02	99,84	69,32	69,38	100	68,85	69,38	100,77
Rata – rata capaian kinerja				99,84			100			100,77

Capaian indikator sasaran Angka Harapan Hidup telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 69,38 masuk dalam kategori baik. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,36 poin. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023, capaian tahun 2022 telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian kinerja sebesar 100,77 persen.

Secara nasional Angka Harapan Hidup rata-rata di Indonesia sebesar 71,85. Melihat trennya, angka harapan hidup semakin meningkat setiap tahunnya termasuk di Kabupaten Muara Enim. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun. Namun dikarenakan Indonesia belum memiliki sistem pendataan kematian berdasarkan kelompok umur, penghitungan angka harapan hidup dilakukan dengan menghitung rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Oleh karena itu angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Jika angka kematian bayi tinggi maka angka harapan hidupnya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, jika angka kematian bayi rendah maka angka harapan hidup tinggi.

Meningkatnya angka harapan hidup menunjukkan akses dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Muara Enim semakin baik. Demikian juga dengan kesadaran masyarakat terkait kesehatan dan gizi semakin meningkat. Terkait dengan angka kematian bayi, keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin apabila persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Berdasarkan tabel persentase perempuan berumur 14 - 49 tahun yang melahirkan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan setiap tahunnya semakin meningkat. Pada tahun 2021

persentase persalinan dengan bidan meningkat dari sebelumnya 58,08 persen menjadi 76,82 persen sedangkan persalinan dengan dukun beranak atau paraji menurun dari sebelumnya 6,90 persen menjadi 2,14 persen.

Tabel 3.7. Persentase perempuan berumur 14 - 49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir menurut penolong proses kelahiran terakhir 2017 - 2021

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Kesehatan					
Dokter	17,47	27,17	28,60	35,02	19,44
Bidan	68,9	63,42	60,65	58,08	76,82
Tenaga Kesehatan Lainnya	0	0	3,03	3,03	0,58
Bukan Tenaga Kesehatan					
Dukun Beranak, Paraji	12,54	9,41	6,96	6,90	2,14
Lainnya	1,40	0	0,75	0	1,02
Tidak ada	0	0	0	0	0

Sumber : BPS Muara Enim, 2022

Untuk meningkatkan imunitas dan gizi balita, Pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambah atau mengganti makanan atau minuman lain. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2021 anak usia dua tahun di Kabupaten Muara Enim yang mendapatkan ASI eksklusif sebanyak 63,74 persen meningkat dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 55,22 persen. Selain ASI, imunisasi juga penting untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh balita agar pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Berdasarkan data susenas 2020 dan 2021 dari BPS, persentase balita yang mendapatkan imunisasi wajib meningkat. Dibandingkan tahun 2020, persentase bayi yang mendapatkan imunisasi BCG pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 88,43 persen dimana sebelumnya sebesar 86,07 persen. Imunisasi polio juga mengalami peningkatan dari 85,67 di tahun 2020 menjadi 89,03 persen. Peningkatan persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap serta peningkatan rata-rata pemberian ASI membuat bayi semakin mampu bertahan hidup.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3.3.3. Capaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

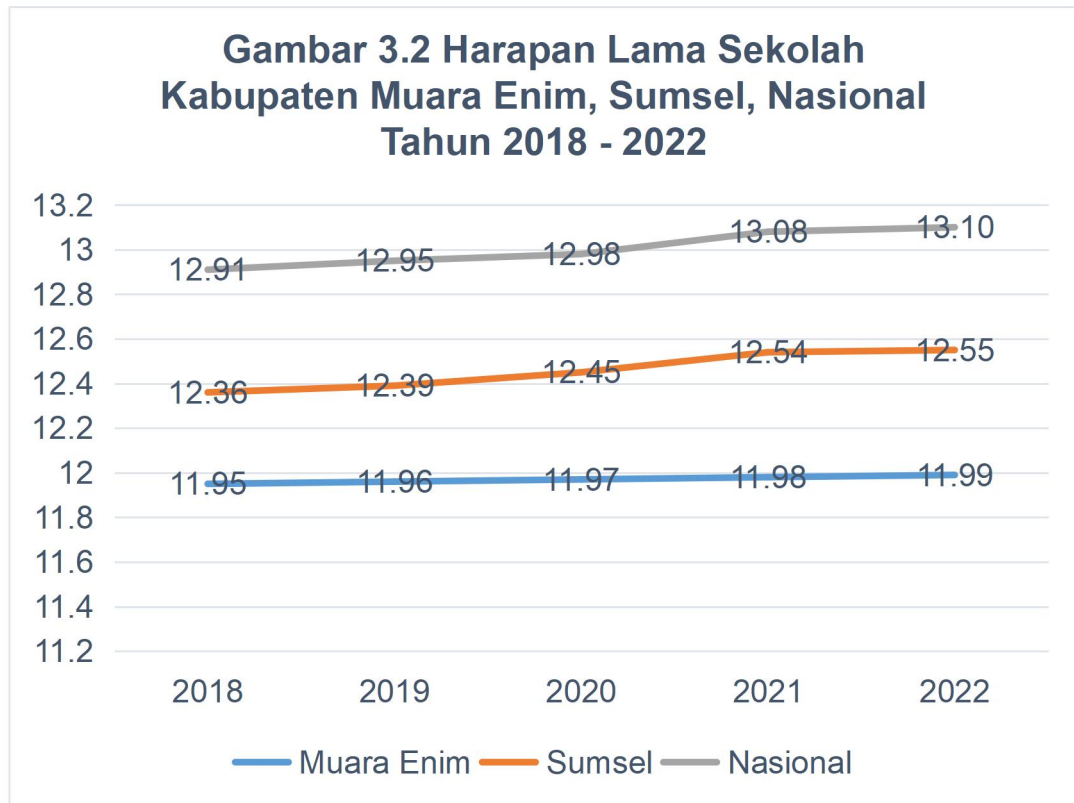
Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018 - 2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,99	11,98	99,91	12,00	11,99	99,16	12,02	11,99	99
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,30	7,80	93,97	8,40	7,90	94,04	8,45	7,90	93,49
Rata – rata capaian kinerja				96,94			96,60			96,25

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan terdiri dari dua indikator sasaran yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Capaian indikator harapan lama sekolah tahun 2022 sebesar 11,99 atau 99,16 persen masuk dalam kategori baik, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah sebesar 7,90 atau 94,04 persen juga berada dalam kategori baik. Secara rata-rata capaian kinerja indikator sasaran sebesar 96,60 persen masuk dalam kategori baik.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 capaian kinerja indikator harapan lama sekolah sebesar 99 persen dan capaian kinerja indikator rata-rata lama sekolah sebesar 93,49 persen. Rata-rata capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 96,25 persen masuk dalam kategori baik.

Angka harapan lama sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun keatas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan lama sekolah Kabupaten Muara Enim tahun 2022 meningkat sebesar 0,01 dibandingkan dengan capaian di tahun 2021. Artinya anak usia 7 tahun memiliki

harapan dapat menikmati pendidikan selama 11,99 tahun atau hingga SMA kelas 3. Harapan lama sekolah Kabupaten Muara Enim masih berada dibawah harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan yaitu 12,55 dan harapan lama sekolah Indonesia yaitu 13,10 pada tahun 2022.



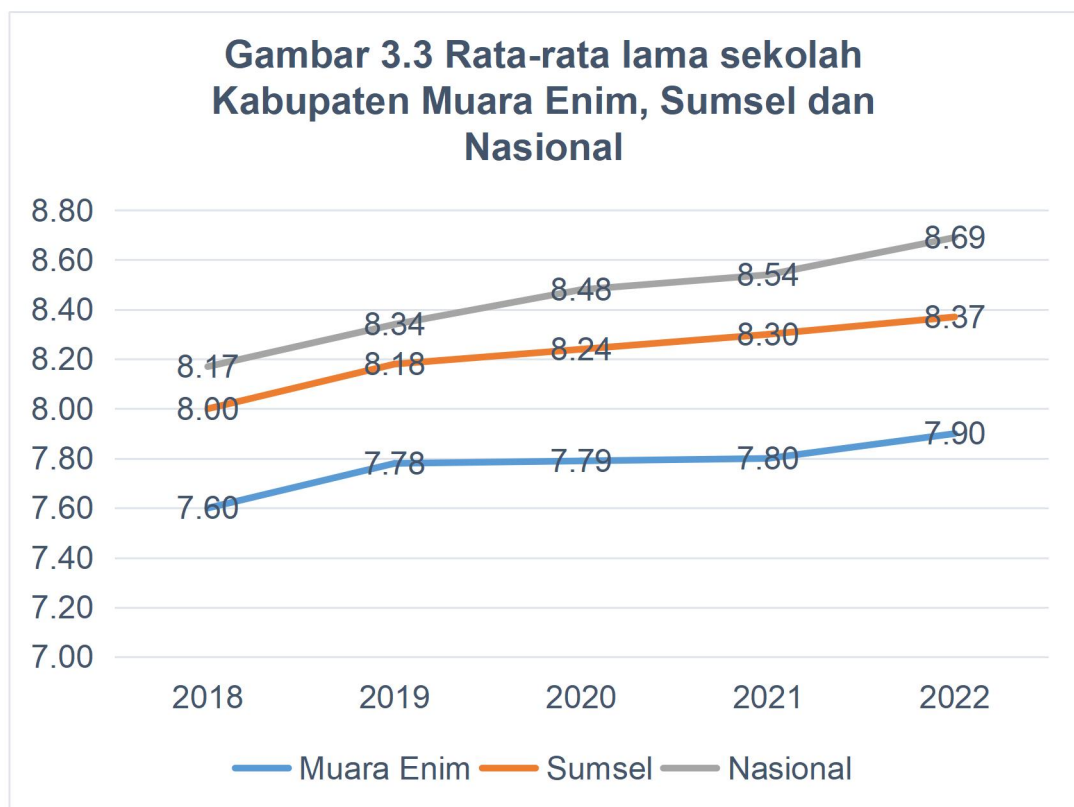
Sumber : Diolah dari data BPS 2023

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harapan lama sekolah antara lain melalui program sosialisasi pendidikan yang bertujuan memberikan kesadaran dan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi sehingga dengan pendidikan yang lebih tinggi akan mampu memperbaiki kondisi perekonomian. Dari sisi sarana prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas guru untuk keberlanjutan proses dan kualitas pendidikan serta melengkapi dan membangun sarana/prasarana pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat misalnya dengan memastikan lokasi sekolah mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya indikator rata-rata lama sekolah dihitung pada penduduk usia 25 tahun keatas yaitu pada penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan dan masuk ke pasar kerja. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Muara Enim tahun 2022 sebesar 7,90 naik sebesar 0,1 dibandingkan tahun 2021. Hal ini berarti penduduk

Kabupaten Muara Enim usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,90 tahun atau setara SMP kelas 2. Walaupun capaian indikator rata-rata lama sekolah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 8,40. Belum tercapainya target ini disebabkan karena masih banyak masyarakat dimasa lampau yang tidak melanjutkan sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah adalah dengan meningkatkan partisipasi penduduk diatas usia 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formal melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (kejar paket A, B dan C).

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Muara Enim tahun 2022 masih berada dibawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, dimana rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 8,37 dan rata-rata lama sekolah Nasional sebesar 8,69.



Sumber : Diolah dari data BPS 2023

Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator sasaran antara lain program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan, program pengendalian perizinan

pendidikan, program pengembangan bahasa dan sastra, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

3.3.4. Capaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Tingkat Daya Beli Masyarakat (Pengeluaran per kapita)	Juta	Rp. 10,95	Rp. 10,99	100,36	Rp. 10,95	Rp. 10,99*	100,36	Rp. 16,568	Rp.10,99*	66
Rata – rata capaian kinerja				100,36						66

* Data tahun sebelumnya

Capaian indikator sasaran pengeluaran per kapita (daya beli masyarakat) masih menggunakan data tahun 2021 karena data tersebut belum dirilis oleh BPS sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu dari target sebesar Rp. 10,95 juta terealisasi sebesar Rp. 10,99 juta atau sebesar 100,36 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 66 persen dari target akhir RPJMD.

Daya beli dapat diartikan seberapa tinggi tingkat kemampuan konsumen atau masyarakat dalam membeli serta mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Tahun 2022 pandemi Covid-19 masih mempengaruhi perekonomian dunia termasuk Kabupaten Muara Enim meskipun aktivitas perekonomian di Muara Enim mulai terlihat. Salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat adalah inflasi. Jika inflasi tidak dikendalikan maka penurunan daya beli menjadi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan berbagai langkah dalam rangka pengendalian inflasi antara lain dengan melaksanakan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan, melakukan pemantauan atas ketersediaan pangan serta kelancaran dalam distribusi pangan, optimalisasi Gerakan Stabilitas Harga Pangan (GSHP) dan Ketersediaan Pasokan Harga (KPSH) dengan mobilitas di pasar, terselenggaranya kegiatan Toko Tani di

Kabupaten Muara Enim, serta bekerja sama dengan satgas pangan mencegah terjadinya penimbunan, target dan hal lainnya yang mengganggu ketersediaan pasokan pangan.

Dilakukan pengelolaan pangan dan edukasi, dengan melakukan kemandirian pangan rumah tangga antara lain melalui pertanian rumah tangga, pengadaan komoditi beras bagi pegawai di lingkungan Pemerintah, melakukan edukasi dan sosialisasi melalui media massa agar masyarakat bijak berkonsumsi dan sadar inflasi. Selain itu, juga edukasi kepada masyarakat agar dapat mengkonsumsi bahan pangan substitusi seperti ikan dan daging beku.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator sasaran ini terkait pengendalian inflasi antara lain:

1. Memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan. Hal ini memerlukan laporan ketersediaan komoditas pangan yang telah memperhitungkan kebutuhan wilayah sehingga didapat data surplus/ defisit pangan yang lebih akurat.
2. Melakukan pemantauan harga antara lain melalui operasi pasar, sidak pasar, pasar murah.
3. Mendorong peningkatan kapasitas produksi pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian

Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator sasaran antara lain program pemberdayaan sosial, program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program peningkatan kerjasama desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program pembinaan keluarga berencana, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (umkm), program pengembangan umkm, program pengembangan iklim

penanaman modal, program promosi penanaman modal, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program perekonomian dan pembangunan, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

3.3.5. Capaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,21	6,40	103	6,29	8,39	133,39	6,37	8,39	131,71
Indeks Gini Ratio	Indeks	0,31	0,34	91,18	0,31	0,34*	91,18	0,31	0,34*	91,18
PDRB Perkapita	Juta	Rp.109	Rp. 104	95,41	Rp.120	Rp 181	150,83	Rp. 132	Rp. 181	137,12
Rata – rata capaian kinerja				96,53			125,13			120

*Data tahun 2021

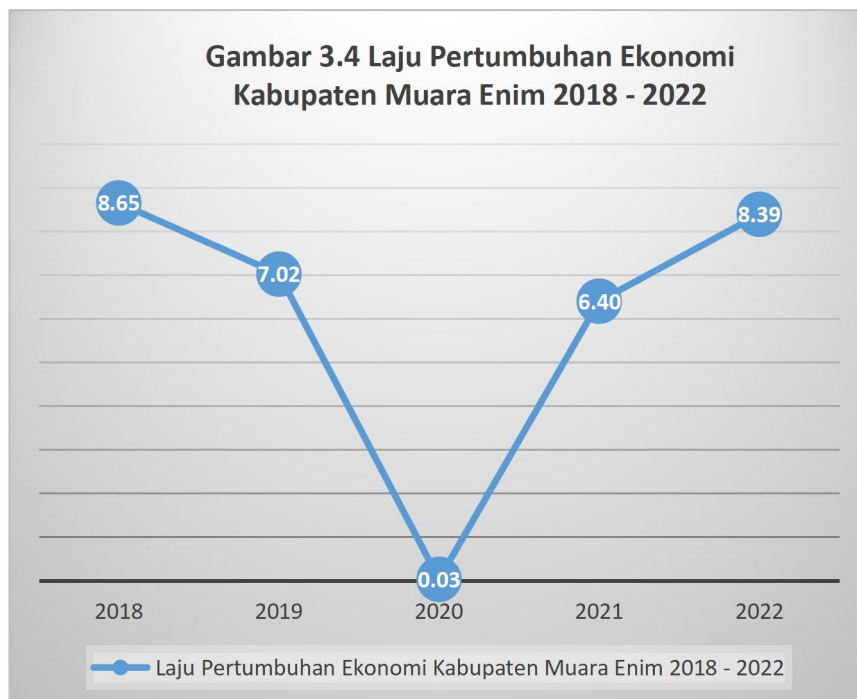
Sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan rakyat terdiri dari tiga indikator sasaran. Nilai indikator sasaran dari ketiga sasaran strategis ini terdapat satu indikator yang belum dirilis oleh BPS sehingga masih menggunakan data tahun 2021. Capaian indikator sasaran pertama laju pertumbuhan ekonomi dari target yang ditetapkan sebesar 6,29 persen terealisasi sebesar 8,39 persen atau capaian kinerja sebesar 133,39 persen berada dalam kategori sangat baik. Capaian indikator sasaran kedua indeks gini belum dirilis BPS sehingga masih menggunakan data tahun 2021 yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 0,31 terealisasi sebesar 0,34 atau capaian kinerja sebesar 91,18 persen berada dalam kategori baik. Untuk capaian indikator sasaran ketiga yaitu PDRB Perkapita yaitu dari target sebesar Rp. 120 juta terealisasi sebesar Rp. 181 juta dengan capaian kinerja sebesar 150,83 persen. Secara rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 5 meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebesar 125,13 persen berada dalam kategori sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2018 - 2023 maka capaian kinerja indikator sasaran laju pertumbuhan ekonomi sudah tercapai

sebesar 131,71 persen, indikator indeks gini ratio telah tercapai sebesar 91,18 persen dan indikator PDRB Perkapita telah tercapai 13,12 persen. Secara rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 5 meningkatnya kesejahteraan masyarakat tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 120 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi atau tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan kondisi suatu perekonomian pada periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2022 sebesar 8,39 persen merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim disumbang paling tinggi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalan serta transportasi dan perdagangan. Seluruh kategori memberikan sumbangan positif untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim.



Sumber : BPS Muara Enim, 2023

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 5,31 persen, serta lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun sebesar 5,23 persen.

Indeks Gini Ratio

Gini ratio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan rendah 40% terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun ukuran ketimpangan gini ratio meliputi ketimpangan rendah (gini ratio < 0,3), sedang ($0,3 \leq \text{gini ratio} \leq 0,5$), dan tinggi (gini ratio > 5). BPS belum merilis nilai gini ratio Kabupaten Muara Enim tahun 2022 sehingga masih menggunakan nilai indeks gini ratio tahun 2021 sebesar 0,34 (ketimpangan sedang) atau capaian kinerja sebesar 91,18 persen berada dalam kategori baik. Indeks gini ratio Kabupaten Muara Enim tahun 2021 sama dengan indeks gini ratio Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan gini ratio di Indonesia pada bulan September 2021 sebesar 0,381.

Gini ratio antara lain dipengaruhi oleh inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Semakin besar tingkat pengangguran disuatu daerah berarti menurunkan tingkat produktivitas dan memicu menurunnya pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Muara Enim tahun 2022 sebesar 4,12 persen lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 sebesar 5,03. Angka ini merupakan terendah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 - 2022

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Muara Enim	4,27	4,78	4,90	5,03	4,12

Sumber : BPS Muara Enim, 2023

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan berbagai program kegiatan yang mendorong turunnya tingkat pengangguran seperti memberikan pelatihan keterampilan kepada pemuda dan pemudi tidak mampu di Kabupaten Muara Enim. Peserta pelatihan diberikan bantuan peralatan sesuai

dengan pelatihan yang diikuti sehingga diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha baru serta membuka lapangan pekerjaan.

PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan pembagian dari PDRB dalam suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB Perkapita, maka wilayah tersebut semakin makmur.

PDRB perkapita Kabupaten Muara Enim cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penurunan terjadi pada tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang menimbulkan gejolak pada perekonomian di daerah dan masih dirasakan dampaknya ditahun 2021. Berdasarkan data BPS, PDRB perkapita Kabupaten Muara Enim tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Kabupaten Muara Enim tahun 2021. Hal ini sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2022.

Data BPS juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja semakin meningkat setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2020 - 2022

Kabupaten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)		
	2020	2021	2022
Muara Enim	68,45	69,57	72,53

Sumber : BPS Muara Enim, 2023

Beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran strategis antara lain program pemberdayaan sosial, program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program peningkatan kerjasama desa, program pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program pembinaan keluarga berencana, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (umkm), program pengembangan umkm, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program perekonomian dan pembangunan, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

3.3.6. Capaian Sasaran Strategis 6 Menurunnya Masyarakat Miskin

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Persentase Penduduk Miskin	%	11,44	12,32	92,86	10,92	11,12	98,20	10,39	11,12	93,44
Rata – rata capaian kinerja				92,86			98,20			93,44

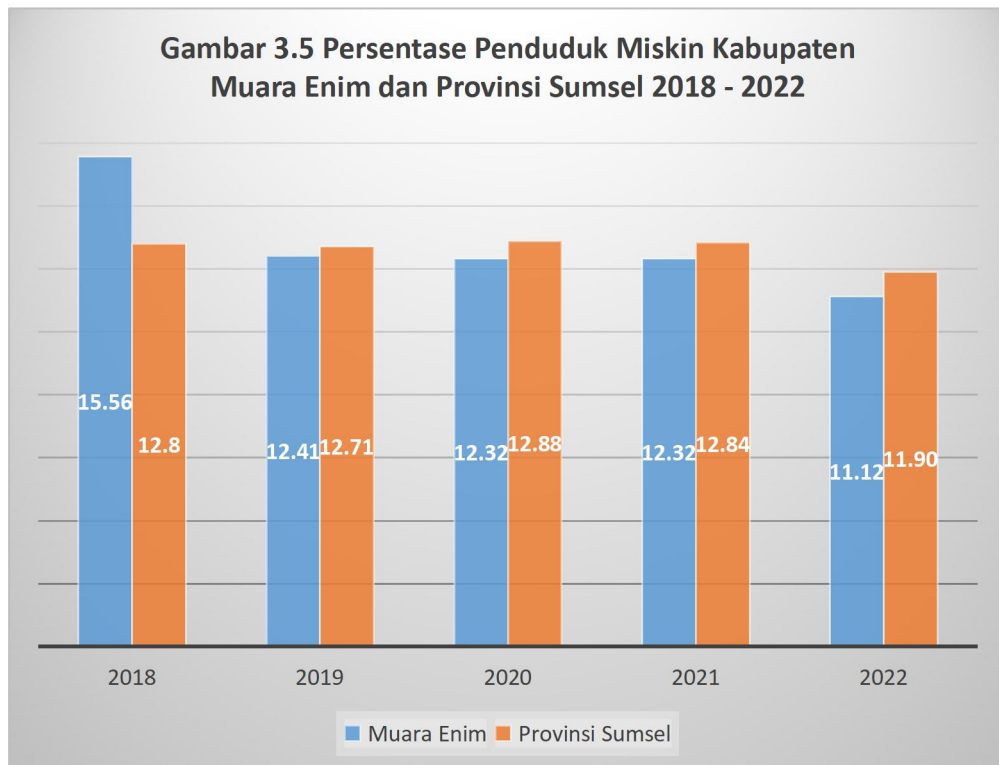
Capaian indikator sasaran persentase penduduk miskin tahun 2022 terealisasi sebesar 11,12 persen dari target sebesar 10,92 persen atau 98,20 persen berada dalam kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 capaian kinerja sebesar 93,44 persen. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, capaian tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian ditahun 2021. Berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 3.14
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 - 2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk miskin (%)	13,19	12,56	12,41	12,32	12,32	11,12
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	81,30	78,58	78,75	79,27	80	73,53

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2022

Apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan tahun 2021, Kabupaten Muara Enim menempati peringkat ke 7. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim masih berada dibawah persentase penduduk miskin Sumatera Selatan sebesar 12,84. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim dengan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Diolah dari data BPS 2023

Secara rata-rata persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim masih berada dibawah persentase penduduk miskin Sumatera Selatan. Dampak Pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat dimana sektor perekonomian menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan aktivitas usaha dan kehidupan masyarakat yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Keberhasilan langkah penanganan Covid menjadi penentu yang mempengaruhi berbagai dampak yang ditimbulkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 yaitu dengan program vaksinasi. Keberhasilan program vaksinasi menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi. Keberhasilan vaksinasi juga menjadi kunci utama dalam mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga yang menjadi tumpuan roda perekonomian. Semakin

tinggi capaian vaksinasi daerah, maka pemulihan kondisi perekonomian daerah juga semakin cepat.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator sasaran yaitu dengan meningkatkan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur antara lain :

1. Program sekolah gratis, memberikan pakaian sekolah gratis, perbaikan sekolah.
2. Perbaikan puskesmas.
3. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin/ masyarakat tidak mampu.
4. Bantuan sanitasi bagi masyarakat miskin/ masyarakat tidak mampu.
5. Perbaikan jalan untuk membuka akses perekonomian bagi masyarakat, misalnya akses jalan baru Muara Harapan - Simpang Aur, Pagar Agung - Pagar Dewa.
6. Memberikan bantuan bibit dan Alsintan (alat mesin pertanian) kepada masyarakat.
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator sasaran antara lain program pemberdayaan sosial, program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program peningkatan kerjasama desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program pembinaan keluarga berencana, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (umkm), program pengembangan umkm, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program peningkatan

sarana distribusi perdagangan, program perekonomian dan pembangunan, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

3.3.7. Capaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (61)	CC (59,42)	97,41	B (61)	B	100	B (61)	B	100
Rata – rata capaian kinerja				97,41			100		100	100

Capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu “B” dengan capaian kinerja sebesar 100 persen berada dalam kategori “Baik”. Capaian kinerja tahun 2022 melebihi capaian kinerja tahun 2021. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 capaian kinerja tahun 2022 telah tercapai sebesar 100 persen.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja antara lain :

1. Tim pokja reformasi birokrasi tingkat Kabupaten telah melakukan rapat internal sebagai langkah awal untuk melakukan evaluasi terhadap program/ kerja reformasi birokrasi berdasarkan rencana kerja/ rencana aksi tahun 2022 yang telah disusun.
2. Terhadap peningkatan pengetahuan asesor PMPRB telah dilaksanakan sosialisasi PMPRB pada tanggal 23 Desember 2021 dengan narasumber dari Kementerian PAN RB serta memberikan pendampingan pengisian LKE PMPRB kepada para asesor.
3. Pada area penataan peraturan perundang-undangan / deregulasi kebijakan telah dibentuk tim harmonisasi peraturan perundang-undangan dan telah dilakukan sosialisasi proses penyusunan kebijakan melalui sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan narasumber dari LAN RI.

4. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi dengan tingkat penataan organisasi sebesar 100% sesuai dengan kriteria model yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN RB.
5. Pemkab Muara Enim telah melakukan penataan nomenklatur Perangkat Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
6. Pada implementasi SPBE, telah dilakukan rapat koordinasi tim SPBE pada bulan Januari dan Maret 2022. Disamping itu juga, melalui Dinas Kominfo telah dilakukan pengembangan infrastruktur IT serta pengintegrasian data center.
7. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) dengan narasumber dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia).
8. Audit kearsipan terhadap 35 Perangkat Daerah dan 22 Kecamatan rutin dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menduduki peringkat ke 6 se-Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 73,25 kategori sangat baik.
9. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendukung implementasi keterbukaan informasi publik melalui Website PPID yang dapat diakses oleh masyarakat. Website PPID menampilkan informasi dokumentasi kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
10. Perangkat Daerah telah menetapkan perjanjian kinerja hingga level staf pelaksana, penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, serta telah menginput SKP harian melalui aplikasi e-kinerja.
11. Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga telah menyusun standar kompetensi jabatan dan melakukan penilaian dan pemetaan kompetensi PNS sebanyak 526 orang PNS.
12. Telah dilakukan pengintegrasian e-sakip dengan e-kinerja. Sejak bulan Maret 2022 seluruh PNS telah mengisi SKP harian melalui aplikasi e-kinerja.

13. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendorong dan mengusulkan unit kerja untuk ikut serta dalam penilaian zona integritas. Sebanyak 3 Perangkat Daerah telah lulus seleksi administrasi untuk mendapatkan predikat (WBK).
14. Untuk memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal telah diterbitkan surat edaran gratifikasi, telah dibentuk unit pengendali gratifikasi dimana sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, serta penetapan Peraturan Bupati tentang *Whistle Blower System*.
15. Inspektorat telah melakukan sosialisasi SPIP terhadap seluruh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah pun telah melakukan penilaian mandiri SPIP ke dalam aplikasi SPIP terintegrasi.
16. Terhadap kebijakan penanganan pengaduan masyarakat, Dinas Kominfo telah melakukan berbagai kegiatan antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengaduan pelayanan publik melalui kegiatan *Lapor Goes to Dusun* yaitu sosialisasi ke seluruh Desa pada Kecamatan di Kabupaten Muara Enim, sosialisasi *Lapor on the road* dilaksanakan pada setiap event ditingkat Kabupaten.
17. Untuk meningkatkan kompetensi pejabat penghubung dalam mengelola pengaduan melalui SP4N Lapor! telah diselenggarakan bimbingan dan koordinasi teknis SP4N Lapor!.
18. Pada tahun 2021 LHKPN Kabupaten Muara Enim mencapai 100% atau sebanyak 438 wajib lapor, sedangkan pelaporan LHKASN pada tahun 2022 per Juli 2022 sebesar 97,64% atau sebanyak 910 orang dari 932 orang yang sudah melakukan pelaporan.
19. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memberikan pelatihan petugas pelayanan, melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan mempublikasikan hasil survei tersebut pada website, medsos, dan di ruang pelayanan.
20. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik.

Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah daerah.

2. Menyusun kegiatan yang terpadu berdasarkan pada penetapan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan oleh organisasi.
3. Menciptakan budaya kerja positif dengan memaksimalkan peran Agen Perubahan/Kelompok Budaya Kerja disertai target-target nyata pada masing-masing unit kerja.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP secara berkala sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.
5. Mengoptimalkan implementasi SPBE sehingga dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi, meningkatkan produktivitas pegawai, dan memberikan nilai tambah terhadap pelayanan kepada masyarakat.
6. Melakukan rapat tindak lanjut bersama dengan konsultan dari ACT Consulting International terhadap hasil survei pemetaan dan pengukuran budaya kerja ASN - Indeks BerAKHLAK Kabupaten Muara Enim.

Beberapa program yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, program perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, program administrasi umum, program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program perekonomian dan pembangunan, program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, program pengembangan sumber daya manusia, program penyelenggaraan pengawasan, program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi.

3.3.8. Capaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Pelayanan Publik

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B - (3,48)	B (3,90)	112,07	B	A - (4,10)	105,13	N/A	A-	N/A
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Kabupaten terinovatif	Sangat Inovatif	100	Kabupaten terinovatif	Inovatif	75	N/A	Inovatif	N/A
Rata – rata capaian kinerja				106,03			90,05			N/A

Indikator sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik terdiri dari dua indikator sasaran yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Inovasi Daerah. Indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2022 berhasil mendapatkan nilai A- melebihi target yang ditetapkan yaitu B dengan persentase capaian kinerja sebesar 105,13 persen.

Capaian indikator kedua yaitu Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 Kabupaten Muara Enim berhasil meraih predikat daerah inovatif sehingga capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 75 persen. Secara rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan publik sebesar 90,05 persen berada dalam kategori baik. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target RPJMD 2018 - 2023 tidak dapat dilakukan karena indikator Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Inovasi Daerah tidak terdapat dalam RPJMD.

Evaluasi kinerja pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim tahun 2022 dilaksanakan terhadap dua unit penyelenggara pelayanan publik yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.17
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018 -2022

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	IPP	Kategori	IPP	Kategori	IPP	Kategori	IPP	Kategori	IPP	Kategori
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,53	C (Cukup)	3,21	B- (Baik dengan Catatan)	3,49	B- (Baik dengan Catatan)	4,02	A - (Sangat Baik)	4,23	A- (Sangat Baik)
RSUD Dr. HM. Rabain	3,57	B (Baik)	3,71	B (Baik)	-	-	-	-	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,98	C (Cukup)	-	-	3,46	B- (Baik dengan Catatan)	3,78	B (Baik)	3,98	B (Baik)
Rata-rata	3,03	B- (Baik dengan Catatan)	3,46	B- (Baik dengan Catatan)	3,48	B- (Baik dengan Catatan)	3,90	B (Baik)	4,10	A- (Sangat Baik)

Sumber : Data diolah

Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Muara Enim setiap tahun cenderung meningkat dikarenakan unit penyelenggara layanan di Kabupaten Muara Enim senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PAN RB. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan setiap tahun diketahui kepuasan masyarakat juga meningkat terutama pada unit pelayanan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim antara lain:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Standar Pelayanan Publik.
2. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mendapatkan masukan dari masyarakat pengguna layanan terkait pelayanan pada unit penyelenggara layanan.
3. Memberikan pelatihan kepada pegawai dan petugas pelayanan.
4. Mendorong unit pelayanan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala serta mempublikasikan hasil survei.
5. Mendorong unit pelayanan menindaklanjuti hasil survei dan menyampaikan laporan tindak lanjut.
6. Monitoring Pelayanan Publik Bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan di unit-unit layanan di Kabupaten Muara Enim

Selain itu berdasarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2022, Kabupaten Muara Enim masuk dalam zona hijau dengan opini

kepatuhan tinggi. Pada tahun 2022, penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 - 6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022, Kabupaten Muara Enim berhasil masuk dalam kategori inovatif dan berada pada peringkat 43 dari 415 Kabupaten yang mengikuti *Innovative Government Awards* (IGA) dengan skor indeks sebesar 57,94.

Pengukuran indeks inovasi daerah tahun 2022 banyak mengalami perubahan indikator antara lain di tahun 2021 penilaian didasarkan kepada kualitas data dukung dari satua inovasi sedangkan di tahun 2022 indikator ini ditambahi dengan jumlah atau kuantitas satuan inovasi yang dilaporkan terutama inovasi yang diimplementasikan tahun 2020 dan 2021 (minimal 200 inovasi untuk mencapai nilai kuantitas skor maksimal), kemudian juga verifikasi laporan inovasi tahun 2022 dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Jumlah inovasi yang dilaporkan hanya berjumlah 113 satuan inovasi ditahun 2022 (inovasi yang diimplementasikan tahun 2020 dan 2021).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran strategis ini antara lain :

1. Untuk meningkatkan inovasi di Perangkat Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 176/KPTS/Balitbangda/2023 tentang pejabat penggerak inovasi organisasi perangkat daerah/ wali inovasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
2. Memberikan insentif kepada pejabat penggerak inovasi/ wali inovasi perangkat daerah.
3. Penambahan kluster penerima penghargaan Top 10 inovasi Perangkat Daerah dari 10 menjadi 20 penerima penghargaan dengan kategori 10 Perangkat Daerah dan 10 Kecamatan di tahun 2023 dan meningkatkan nominal uang pembinaan.
4. Untuk menambah kuantitas inovasi Perangkat Daerah, terhadap hasil aksi perubahan Diklat PIM 3 dan aktualisasi diklat dasar CPNS untuk dilengkapi data dukungnya guna dijadikan inovasi yang akan diikutsertakan pada pengukuran indeks inovasi daerah pada tahun 2023.

5. Melakukan pembinaan dan inventarisasi inovasi daerah yang dilakukan oleh stakeholder pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran yaitu program penanggulangan bencana, program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, program pengelolaan profil kependudukan, program pembinaan perpustakaan, program pengelolaan kearsipan, program perlindungan dan penyelamatan arsip, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, program penelitian dan pengembangan daerah.

3.3.9. Capaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2021-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100	WTP	WTP*	100	WTP	WTP*	100
Rata – rata capaian kinerja							100			100

*Nilai tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Opini BPK dengan target WTP terealisasi WTP atau 100% telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2022. Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 adalah 100 persen dengan Kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 maka capaian kinerja tahun 2022 telah 100 persen sesuai target RPJMD.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2023 diperoleh dari rumusan atas opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2022 belum dirilis oleh BPK sehingga masih

menggunakan nilai tahun 2021 dengan opini WTP, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 tetap dengan opini WTP yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2021, terlihat dapat dipertahankan dimana capaian awal sampai dengan tahun 2023 Opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim masih tetap dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian kinerja ini disebabkan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan standar pemeriksaan yang dijadikan pedoman oleh Auditor BPK. Predikat WTP dapat diberikan jika dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang digambarkan melalui kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan telah memenuhi 4 (empat) persyaratan berikut :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, artinya bahwa laporan keuangan yang telah disusun telah mempedomani atau telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Tersebut.
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), bahwa semua informasi keuangan yang signifikan telah dijelaskan secara rinci, diberikan penjelasan yang cukup memadai untuk memudahkan pembaca laporan keuangan dalam informasi yang disajikan.
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu terkait dengan ketaatan seluruh insan pengelola kegiatan dan pengelola pemerintahan dengan peraturan yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BPK berdasarkan audit yang dilakukannya terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah disampaikan oleh SKPD Pemerintahan Kabupaten Muara Enim baik bukti keuangan dan maupun bukti non keuangan dan pemeriksaan lapangan, telah menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2020, dalam semua hal yang material telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk laporan keuangan Tahun 2023 capaian sasaran diharapkan adalah meraih Opini WTP, namun pada saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023, opini BPK RI belum dapat diketahui karena laporan keuangan Tahun 2022 masih dalam proses penyusunan. Target indikator kinerja opini BPK RI pada Tahun 2022 adalah WTP dan diharapkan meraih opini WTP.

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui 2 (dua) program strategis, 4 (empat) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, program ini didukung dengan 3 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, program ini didukung dengan 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan.

3.3.10. Capaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks	56,5	54,3*	96,11	57	53,26*	93,44	N/A	54,3	N/A
Rata – rata capaian kinerja							93,44			N/A

*Pengukuran mandiri

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) tahun 2022 saat ini belum dirilis dan masih menunggu hasil pengukuran dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI). Hasil pengukuran BKN RI terhadap profesionalitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim diperkirakan baru akan keluar pada bulan Juni 2023. Berdasarkan hasil pengukuran mandiri IP ASN Kabupaten Muara Enim diperoleh capaian kinerja tahun 2022 sebesar 53,26 atau 93,44 persen berada dalam kategori baik. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 tidak dapat dilakukan karena indikator sasaran ini tidak terdapat dalam RPJMD.

Pengukuran IP ASN didasarkan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan peraturan

tersebut standar pengukuran IP ASN menggunakan empat standar dimensi pengukuran yaitu :

1. Dimensi kualifikasi yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
2. Dimensi kompetensi yaitu dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. Dimensi kinerja yaitu dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kinerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. Dimensi disiplin yaitu dimensi yang menggambarkan kesanggupan seseorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan, apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Belum tercapainya target kinerja tahun 2022 tersebut dikarenakan untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi aparatur telah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal dikarenakan jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi masih sangat rendah dibandingkan jumlah ASN yang ada.

Beberapa hal yang akan dilakukan sebagai upaya pencapaian target kinerja antara lain :

1. Peningkatan jenjang/ tingkat pendidikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui peningkatan program tugas belajar bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
2. Mengupayakan peningkatan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan fungsional, serta pelatihan teknis dan kegiatan pengembangan lainnya bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Meningkatkan penganggaran program tugas belajar dan pengembangan aparatur.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan stakeholder lainnya.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan kedinasan terutama pembangunan gedung diklat yang akan dilakukan melalui CSR.
6. Meningkatkan kinerja individu dan disiplin ASN, melalui sasaran kinerja pegawai dan penangguhan pembayaran TPP bagi ASN yang tidak menyusun dan menyampaikan laporan kinerja tahunan.

Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain :

1. Program kepegawaian daerah
 - a. Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN
 - b. Mutasi dan promosi ASN
 - c. Pengembangan kompetensi
 - d. Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
2. Program pengembangan sumber daya manusia
 - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan.
 - b. Pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama, serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan.

3.3.11. Capaian Sasaran Strategis 11 Menguatnya Pengawasan

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat	3,32	3,00	90,36	3,02	2,856	94,57	3,02	2,856	94,57
Rata – rata capaian kinerja				90,36			94,57			94,57

Indikator sasaran tingkat Maturitas SPIP tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 2,856 atau 94,57 persen berada dalam kategori baik. Karakteristik maturitas pada level 2 (berkembang) menunjukkan bahwa masih terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja pada Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil dan belum selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya, masih terdapat kualitas sasaran program dan keterkaitan dengan sasaran Perangkat Daerah yang belum tepat, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap Kabupaten yang belum dilakukan secara tertib, dan masih terdapat aset berupa tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan atau belum bersertifikat.

Upaya - upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator sasaran tingkat maturitas SPIP antara lain :

1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, proses manajemen risiko dan pencegahan/pemberantasan korupsi di lingkungan Kabupaten Muara Enim.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan Pemda dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2023, dalam rangka memastikan bahwa:
 - a. Tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Muara Enim maupun Perangkat Daerah telah berorientasi hasil, dan indikator kinerja memenuhi kriteria "SMART-C" (*specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded*, dan *continuously improved*).
 - b. Rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan Pemda dan Perangkat Daerah telah selaras.
3. Inspektur dan/atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk merencanakan program pelatihan/sertifikasi terkait SPIP terintegrasi, MRI dan IEPK baik tahunan maupun lima tahunan dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan pegawai/SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Inspektur melakukan peran Inspektorat Daerah selaku APIP dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, manajemen risiko dan upaya pencegahan/pemberantasan korupsi, dengan melakukan:

- a. Konsultasi/bimtek kepada/dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ataupun pihak lain yang memiliki kompetensi tersebut.
 - b. Studi banding / percontohan kepada Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan penilaian level 3 maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi/MRI/IEPK.
 - c. Penyediaan anggaran untuk penerapan SPIP Terintegrasi, MRI, dan IEPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
 - d. *Updating* pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Perangkat daerah terkait yang belum melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset tetap dengan tertib untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK yang disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 40.A/LHP/XVIII.PLG/05/2022 tanggal 17 Mei 2022.
6. Perangkat Daerah untuk menginventarisasi dan melakukan *update* terhadap seluruh kebijakan/aturan, baik yang ditetapkan oleh Kementerian terkait maupun Kepala Daerah dan atau Kepala Perangkat Daerah, dan mengkomunikasikan serta mendokumentasikan penerapan dari kebijakan/aturan tersebut di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

1. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan pengawasan internal.
 - a. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah.
 - b. Reviu laporan keuangan.
 - c. Pengawasan desa.
 - d. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
4. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
 - a. Penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah.
 - b. Pengawasan dengan tujuan tertentu.
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan.

3.3.12. Capaian Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Kualitas Perencanaan

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Penghargaan Pembangunan Daerah	Nominasi	Nominasi	Tidak masuk nominasi	0	Nominasi	Tidak masuk nominasi	0	N/A	Tidak masuk nominasi	N/A
Rata – rata capaian kinerja				0			0			N/A

Capaian indikator sasaran Penghargaan Pembangunan Daerah dengan target Nominasi yang akan diraih oleh Kabupaten Muara Enim terealisasi 0 atau nol persen. Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar nol persen masuk dalam kategori kurang. Capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMD 2018 - 2023 karena tidak termasuk dalam RPJMD.

Tahun 2022 Kabupaten Muara Enim tidak masuk nominasi tingkat Provinsi. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan pencapaian sasaran strategis ini antara lain menyusun dan penetapan dokumen perencanaan tepat waktu dan menciptakan inovasi khususnya di sektor perencanaan. Beberapa program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

3.3.13. Capaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2021	
Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	100	BB	BB	100	BB	BB	100
Nilai LPPD	Nilai	Prestasi tinggi	3,2497* (Prestasi Tinggi)	100	Prestasi Tinggi	Prestasi Tinggi* (3,2497)	100	N/A	Prestasi Tinggi*	N/A
Rata – rata capaian kinerja				100			100			N/A

*Data Tahun 2020

Sasaran ke 13 Meningkatnya akuntabilitas kinerja terdiri dari dua indikator sasaran yaitu nilai SAKIP dan nilai LPPD. Target nilai SAKIP tahun 2022 yaitu BB dengan capaian realisasi BB atau 100 persen masuk dalam kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 maka capaian kinerja tahun 2022 telah mencapai target sebesar 100 persen.

Indikator sasaran kedua yaitu nilai LPPD masih menggunakan nilai LPPD tahun 2020 (hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap LPPD tahun 2019) karena Kementerian Dalam Negeri belum merilis hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap LPPD tahun 2020 dan 2021. Capaian kinerja indikator adalah prestasi tinggi atau sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja tahun 2021 sebesar 100 persen berada dalam kategori baik.

Beberapa hal yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi perbaikan SAKIP pada tahun 2022 antara lain :

- 1) Mengintegrasikan e-Sakip dengan e-Kinerja
- 2) Mewajibkan seluruh PNS mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) harian melalui e-Kinerja
- 3) Capaian kinerja bulanan yang diisi melalui e-kinerja menjadi komponen dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
- 4) Melaksanakan evaluasi kinerja dimasing-masing Perangkat Daerah yang bertujuan untuk melihat capaian kinerja yang mendukung tujuan dan sasaran daerah.
- 5) Telah dilakukan sinkronisasi antara dokumen Renstra dan RPJMD yang telah berpedoman dengan Peraturan Perundangan terbaru.
- 6) Penyusunan perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai sampai dengan level pelaksana yang berpedoman pada sasaran Organisasi.
- 7) Melakukan reviu terhadap pohon kinerja dari tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah.
- 8) APIP telah melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021 terhadap seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, perbaikan Kualitas instrumen evaluasi sesuai Permenpan dan RB nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- 9) Meningkatkan kapasitas evaluator dan sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas kinerja dengan melakukan pendampingan bersama Kementerian PAN dan RB
- 10) Dilakukan pendampingan dalam penyusunan laporan kinerja pada Perangkat Daerah. Laporan kinerja sebagian Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim telah menyajikan analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Terkait proses evaluasi terhadap LPPD menggunakan metode pengukuran kinerja terdiri atas dua variabel yaitu Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM). Penilaian Indeks Capaian Kinerja (ICK) terdiri dari :

- 1) Tataran pengambil kebijakan merupakan penilaian terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang terdiri dari 13 aspek;
- 2) Tataran pelaksana kebijakan bidang administrasi umum merupakan penilaian terhadap kinerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari delapan aspek;
- 3) Tataran pelaksana kebijakan urusan Pemerintahan merupakan penilaian kinerja atas kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 32 urusan Pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib dan delapan urusan pilihan.

Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dilakukan penilaian terhadap kesesuaian materi dan yang disajikan dalam LPPD berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tahun 2020 terdapat peningkatan nilai LPPD dibandingkan nilai LPPD tahun 2019. Hal ini terjadi karena di tahun 2020 capaian indikator kinerja makro meningkat dari tahun sebelumnya serta Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat memenuhi data Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

3.3.14. Capaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Indeks SPBE	Indeks	3,00	2,73	91	2,95	2,91	98,64	N/A	2,91	N/A
Rata – rata capaian kinerja				91			98,64			N/A

Tahun 2022 capaian indikator sasaran indeks SPBE dari target sebesar 2,95 terealisasi sebesar 2,91 atau 98,64 persen berada dalam kategori baik. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian tahun 2022 meningkat sebesar 6,59 persen. Perbandingan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 tidak dapat dilakukan karena indikator ini tidak terdapat dalam RPJMD.

Berdasarkan standar penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, indeks SPBE hasil evaluasi eksternal Pemerintah Kabupaten Muara Enim dikategorikan baik. Nilai indeks SPBE tahun 2021 sebesar 2,91 mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2021 sebesar 2,73 namun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 2,95 karena saat ini masih dalam tahap penyesuaian evaluasi SPBE yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020. Dengan diterapkannya instrumen baru ini terdapat penyesuaian dalam penilaian untuk pencapaian peningkatan target indeks SPBE yang sudah ditetapkan.

Upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan nilai indeks SPBE ditahun yang akan datang yaitu hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria yang harus dipenuhi untuk meningkatkan nilai SPBE dalam pencapaian target serta meningkatkan nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator. Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Muara Enim, didukung dengan adanya program aplikasi informatika dan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

3.3.15. Capaian Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 3.24
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2022-2023 (%)
		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022				
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang harmonis	%	100	100	100	100	100	100	NA	100	NA
Rata – rata capaian kinerja				100			100			NA

Capaian indikator sasaran Persentase Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis dengan target 100 persen terealisasi 100 persen, Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 100 persen, dengan kategori **Baik**.

Peraturan Daerah yang diajukan Perangkat Daerah ke Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi dan dibahas DPRD pada tahun 2022 sebanyak 9 Raperda dan yang ditetapkan menjadi Perda sebanyak 9 atau sebesar 100 persen. Penyusunan Perda dilakukan melalui tahapan harmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya Raperda dilakukan pembahasan oleh Bapemperda dan panitia khusus DPRD.

Raperda yang telah dibahas di paripurna oleh DPRD kemudian disepakati oleh Bupati dan DPRD melalui keputusan bersama untuk menjadi Peraturan Daerah. Raperda yang telah disepakati bersama antara Bupati dan DPRD dilakukan fasilitasi oleh Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan. Raperda yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur dimintakan Nomor Register (Noreg) Peraturan Daerah. Setelah mendapatkan Noreg Perda, Raperda ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan penandatanganan dari Menteri Dalam Negeri.

Untuk mendukung kualitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, telah dilakukan pendampingan pada saat penyusunan dan pembuatan naskah akademik dengan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu telah dilakukan evaluasi terhadap Perda dibidang pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak relevan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga

terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditindaklanjuti dengan pencabutan sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini yaitu program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, maka besaran alokasi belanja untuk masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Sasaran Strategis (unaudited)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,32	69,43	100,15 %	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	4.784.916.056,00	3.929.172.053,00	82,12
							Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	23.809.561.550,00	23.080.345.167,00	96,94
							Program pengembangan kapasitas kepramukaan	813.564.994,00	696.587.250,00	85,62
							Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	342.288.600,00	335.214.930,00	97,93
							Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	2.386.756.433,00	2.262.954.263,00	94,81
							Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	685.473.195,00	559.472.905,00	81,62
							Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	728.156.500,00	584.536.840,00	80,28
							Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	987.523.000,00	871.702.100,00	88,27

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.	Angka Harapan Hidup	69,32	69,38	100 %	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	174.899.892.458,00	158.404.816.895,00	90,57
							Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	6.225.360.000,00	5.947.150.000,00	95,53
							Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	290.773.700,00	197.316.550,00	67,86
							Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	711.502.919,00	587.645.300,00	82,59
							Program pengelolaan sumber daya air (sda)	40.864.704.110,00	39.122.279.968,00	95,74
							Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	29.539.003,87	28.723.968.770,00	97,24
							Program penataan bangunan gedung	40.873.290.604,00	33.821.296.585,00	82,75
							Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	13.913.831.921,00	13.060.111.332,00	93,86
							Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	174.098.000,00	173.918.000,00	99,90
							Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	5.839.543.974,00	5.799.137.714,00	99,31
							Program kawasan permukiman	4.757.898,00	-	-
							Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	54.818.705.431,00	53.201.450.271,00	97,05
							Program perlindungan dan jaminan sosial	1.001.181.748,00	927.511.350,00	92,64
							Program peningkatan kualitas keluarga			
							Program pemenuhan hak anak (pha)	909.660.316,00	846.977.385,00	93,11

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Program perlindungan khusus anak	318.662.750,00	293.100.896,00	91,98
							Program perencanaan lingkungan hidup	288.247.676,00	215.819.908,00	74,87
							Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.482.559.334,00	1.333.336.421,00	89,93
							Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	280.568.032,00	226.844.890,00	80,85
							Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	136.888.500,00	111.753.067,00	81,64
							Program pengelolaan persampahan	5.457.891.061,00	5.256.704.800,00	96,31
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan	3.	Angka harapan lama sekolah	12,00	11,99	99,92 %	Program pengelolaan pendidikan	227.959.438.300,00	207.195.575.801,00	90,89
		4.	Rata-rata lama sekolah	8,40	7,90	94,04 %	Program pengembangan kurikulum			
							Program pendidik dan tenaga kependidikan	29.375.284.800,00	29.072.796.752,00	98,97
4.	Meningkatnya standar kelayakan hidup masyarakat	5.	Tingkat daya beli masyarakat	Rp. 10,95	Rp. 10,99	100,36 %	Program penyelenggaraan jalan	457.211.068.460,00	388.213.435.009,00	84,91
							Program pengembangan jasa konstruksi	239.166.338,00	100.64.732,00	42,06
							Program penyelenggaraan penataan ruang	5.616.274.816,00	4.915.907.939,00	87,53
							Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	6.120.361.636,00	6.003.746.609,00	98,09
							Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.645.845.182,00	2.538.120.999,00	95,93
							Program penanganan kerawanan pangan	811.829.600,00	768.860.550,00	94,71

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Program pengawasan keamanan pangan	279.877.416,00	272.741.150,00	97,45
0						Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	76.300.600,00	51.500.246,00	67,50
						Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	80.049.900,00	25.615.650,00	32,00
						Program pendidikan dan latihan perkoperasian	591.500.600,00	514.859.328,00	87,04
						Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	1.179.230.700,00	1.087.414.117,00	92,21
						Program pengelolaan perikanan tangkap	895.907.805,00	861.795.150,00	96,19
						Program pengelolaan perikanan budidaya	6.515.531.039,00	6.289.349.281,00	96,53
						Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2.134.234.595,00	2.065.474.980,00	96,78
						Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.161.225.500,00	736.443.703,00	63,42
						Program pemasaran pariwisata	1.049.992.773,00	996.645.441,00	94,92
						Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	479.854.992,00	462.053.074,00	96,29
						Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	299.999.912,00	293.575.787,00	97,86
						Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	4.810.831.114,00	4.359.374.088,00	90,62
						Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	605.063.450,00	496.039.314,00	81,98
						Program penyuluhan pertanian	3.124.555.464,00	2.286.912.401,00	73,19
						Program penyediaan dan pengembangan sarana	18.427.275.107,00	14.783.690.955,00	80,23

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
						pertanian				
						Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	230.138.500,00	198.953.600,00	86,45	
						Program pengembangan pemukiman	1.615.826.200,00	1.446.755.134,00	89,54	
						Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1.230.521.500,00	1.218.868.971,00	99,05	
						Program standarisasi dan perlindungan konsumen	249.993.600,00	224.374.858,00	89,75	
						Program perencanaan dan pembangunan industri	830.446.002,00	826.155.970,00	99,48	
5.	Meningkatnya kesejahteraan rakyat	6.	Laju pertumbuhan ekonomi	6,29	8,39	133,39 %	Sama dengan sasaran ke 6	-	-	-
		7.	Indeks Gini Ratio	0,31	0,34	91,18 %	Sama dengan sasaran ke 6	-	-	-
		8.	PDRB Per kapita	Rp. 120 jt	Rp. 181 jt	150,83%	Sama dengan sasaran ke 6	-	-	-
6.	Menurunnya masyarakat miskin	9.	Persentase penduduk miskin	10,92	11,12	98,20 %	Program pemberdayaan sosial	12.040.683.400,00	10.678.875.494,00	88,69
						Program rehabilitasi sosial	1.218.865.850,00	1.142.950.629,00	93,77	
						Program pengelolaan taman makam pahlawan	255.623.800,00	254.033.900,00	99,38	
						Program perencanaan tenaga kerja	96.090.800,00	95.557.863,00	99,45	
						Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.543.073.256,00	2.310.681.380,00	90,86	
						Program penempatan tenaga kerja	690.101.000,00	667.842.758,00	96,77	
						Program hubungan industrial	283.073.040,00	277.696.984,00	98,10	
						Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	471.276.642,00	423.579.881,00	89,88	
						Program peningkatan kerjasama desa	220.261.100,00	197.128.450,00	89,50	
						Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	3.772.025.044,00	3.610.118.434,00	95,71	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Program pembinaan keluarga berencana (kb)	5.920.500.160,00	4.850.534.711,00	81,93
							Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	6.595.084.219,00	4.336.036.098,00	65,75
							Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (umkm)	1.309.206.680,00	714.757.057,00	54,59
							Program pengembangan umkm	950.569.400,00	851.742.955,00	89,60
							Program pengembangan iklim penanaman modal	719.129.869,00	598.177.108,00	83,18
							Program promosi penanaman modal	1.005.310.693,00	695.724.441,00	69,20
							Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	627.914.834,00	507.205.703,00	80,78
							Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	9.149.318.600,00	8.738.461.066,00	95,51
							Program perekonomian dan pembangunan	1.156.198.500,00	1.122.142.295,00	97,05
							Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	358.080.500,00	309.627.300,00	86,47
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	10.	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100 %	-	-	-	-
8.	Meningkatnya pelayanan publik	11.	Indeks pelayanan publik	B	A -	105,13 %	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	5.374.023.900,00	5.277.879.900,00	98,21
		12.	Indeks inovasi daerah	Kabupaten Terinovatif	Inovatif	75 %	Program penanggulangan bencana			
							Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	3.703.372.703,00	2.928.113.962,00	79,07
							Program penanggulangan bencana			
							Program perlindungan	230.019.522,00	190.922.650,00	83,00

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						perempuan			
						Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	163.162.570,00	163.161.670,00	100,00
						Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	200.867.052,00	200.747.165,00	99,94
						Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	137.271.100,00	115.589.700,00	84,21
						Program pendaftaran penduduk	2.173.248.250,00	1.822.143.072,00	83,84
						Program pencatatan sipil	518.227.200,00	318.246.989,00	61,41
						Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	561.809.000,00	404.083.028,00	71,93
						Program pengelolaan profil kependudukan	187.721.600,00	164.986.398,00	87,89
						Program penataan desa	16.686.260.117,00	15.851.580.361,00	95,00
						Program administrasi pemerintah desa			
						Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	5.428.635.680,00	5.313.977.479,00	97,89
						Program pengelolaan pelayaran	407.430.468,00	405.166.750,00	99,44
						Program informasi dan komunikasi publik	7.443.862.200,00	7.352.230.398,00	98,77
						Program penyelenggaraan statistik sektoral	423.173.400,00	418.897.883,00	98,99
						Program pelayanan penanaman modal	800.601.778,00	698.878.755,00	87,29
						Program pembinaan perpustakaan	1.738.349.494,00	1.660.870.280,00	95,54
						Program pengelolaan arsip	668.823.700,00	602.806.164,00	90,13
						Program pengendalian kesehatan hewan dan	771.228.944,00	639.913.216,00	82,97

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							kesehatan masyarakat veteriner			
							Program perizinan usaha pertanian	62.775.600,00	60.105.922,00	95,75
							Program penyuluhan pertanian	578.962.600,00	524.903.152,00	90,66
							Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	32.112.506.000,00	29.900.518.293,00	93,11
							Program penelitian dan pengembangan daerah	2.398.044.170,00	1.935.554.053,00	80,71
							Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	8.879.234.199,00	8.661.879.486,00	97,55
9.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	13.	Opini BPK	WTP	WTP	100 %	Program pengelolaan keuangan daerah	441.808.698.823,00	425.331.449.445,00	96,27
							Program pengelolaan barang milik daerah	3.829.311.380,00	3.280.541.612,00	85,67
							Program pengelolaan pendapatan daerah	5.957.029.407,00	5.606.800.611,00	94,12
10.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	14.	Indeks profesionalisme aparatur	57	53,26	93,44 %	Program kepegawaian daerah	5.370.269.799,00	4.192.342.738,00	78,07
							Program pengembangan sumber daya manusia	6.195.598.580,00	4.887.109.496,00	78,88
11.	Menguatnya pengawasan	15.	Tingkat maturitas SPIP	3,02	2,856	94,57 %	Program penyelenggaraan pengawasan	3.196.540.600,00	2.978.099.736,00	93,17
							Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	179.222.000,00	179.144.000,00	99,96
12.	Meningkatnya kualitas perencanaan	16.	Penghargaan pembangunan daerah	Nominasi	Tidak masuk nominasi	0 %	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	4.206.432.486,00	3.178.148.232,00	75,55
							Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.919.924.400,00	1.580.250.752,00	82,31
13.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	17.	Nilai SAKIP	BB	BB	100 %	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1.732.501.800,00	1.553.233.982,00	89,65

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		18.	Nilai LPPD	Prestasi Tinggi	Prestasi Tinggi	100 %	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	401.057.000,00	373.381.418,00	93,10
14.	Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	19.	Indeks SPBE	2,95	2,91	98,64 %	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	322.821.990,00	312.751.987,00	96,88
							Program aplikasi informatika	5.718.240.182,00	5.624.873.519,00	98,37
							Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	292.622.100,00	291.303.940,00	99,55
							Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	272.437.693,00	193.586.150,00	71,06
							Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	414.952.200,00	408.824.416,00	98,52
15.	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	20.	Persentase peraturan perundang-undangan yang harmonis	100	100	100 %	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	7.312.602.125,00	6.812.583.682,00	93,16

Sumber : Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda, 2023

Keterangan : Data realisasi anggaran per Desember 2022

Laporan keuangan merupakan informasi bagi Pemerintah Daerah dan pengguna lainnya untuk menilai akuntabilitas keuangan daerah dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian dari komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode tertentu. Secara ringkas Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Konsolidasi)
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	2,778,603,801,441.00	3,407,221,019,083.27	122,62	2,739,438,218,970.96
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256,666,783,370.00	251,758,477,178.25	98,09	240,472,782,977.73
Pajak Daerah	78,557,852,584.00	89,016,060,316.00	113,31	83,461,029,231.00
Retribusi Daerah	8,342,300,004.00	4,655,144,901.06	55,80	7,597,636,861.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33,935,626,667.00	33,935,626,663.89	100,00	11,215,922,234.31
Lain-lain PAD yang Sah	135,831,004,115.00	124,151,645,297.30	91,40	138,198,194,651.42
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	256,666,783,370.00	251,758,477,178.25	98,09	240,472,782,977.73
PENDAPATAN TRANSFER	2,497,361,777,820.00	3,124,096,209,539.53	125,10	2,392,309,779,735.74
Dana Perimbangan	2,069,691,000,436.00	2,625,372,933,742.00	126,85	1,992,765,223,046.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1,082,472,942,436.00	1,697,202,499,812.00	156,79	1,153,649,135,021.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	606,756,199,000.00	602,430,247,900.00	99,29	606,450,888,000.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	133,306,757,000.00	109,904,259,513.00	82,44	84,960,801,881.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	247,155,102,000.00	215,835,926,517.00	87,33	147,704,398,144.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	2,069,691,000,436.00	2,625,372,933,742.00	126,85	1,992,765,223,046.00

Dana Insentif Daerah (DID)	18,383,720,000.00	18,383,720,000.00	100,00	7,519,190,000.00
Dana Desa	226,087,294,000.00	226,087,294,000.00	100,00	236,322,582,000.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	244,471,014,000.00	244,471,014,000.00	100,00	243,841,772,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	183,199,763,384.00	254,252,261,797.53	138,78	155,702,784,689.74
Pendapatan Bagi Hasil	144,773,925,294.00	227,666,235,187.53	157,26	143,626,139,794.25
Bantuan Keuangan	38,425,838,090.00	26,586,026,610.00	69,19	12,076,644,895.49
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	183,199,763,384.00	254,252,261,797.53	138,78	155,702,784,689.74
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	2,497,361,777,820.00	3,124,096,209,539.53	125,10	2,392,309,779,735.74
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24,575,240,251.00	31,366,332,365.49	127,63	106,655,656,257.49
Pendapatan Hibah	21,157,707,616.00	23,150,316,614.00	109,42	13,020,513,894.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3,417,532,635.00	8,216,015,751.49	240,41	93,635,142,363.49
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24,575,240,251.00	31,366,332,365.49	127,63	106,655,656,257.49
JUMLAH PENDAPATAN	2,778,603,801,441.00	3,407,221,019,083.27	122,62	2,739,438,218,970.96
BELANJA DAERAH	3,244,413,657,771.00	2,860,522,415,801.33	88,17	2,406,930,642,146.49
BELANJA OPERASI	1,950,614,791,517.00	1,678,254,571,789.33	86,04	1,555,615,618,805.69
Belanja Pegawai	1,007,457,794,731.00	841,935,551,739.16	83,57	798,589,168,955.45
Belanja Barang dan Jasa	877,193,977,263.00	783,816,665,008.17	89,35	717,341,242,809.24
Belanja Bunga	6,000,000,000.00	4,890,886,629.00	81,51	4,623,908,646.00
Belanja Subsidi	285,000,000.00	80,700,000.00	28,32	477,192,500.00
Belanja Hibah	57,049,819,523.00	44,939,868,413.00	78,77	31,980,505,895.00
Belanja Bantuan Sosial	2,628,200,000.00	2,590,900,000.00	98,58	2,603,600,000.00
JUMLAH BELANJA OPERASI	1,950,614,791,517.00	1,678,254,571,789.33	86,04	1,555,615,618,805.69
BELANJA MODAL	864,788,088,882.00	767,192,366,640.00	88,71	431,576,458,354.80
Belanja Modal Tanah	2,609,000,000.00	2,496,173,000.00	95,68	5,180,270,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110,978,555,723.00	98,459,188,747.00	88,72	83,807,398,797.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196,234,690,280.00	182,055,146,440.00	92,77	93,439,626,152.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	545,280,547,979.00	474,677,031,288.00	87,05	237,036,945,569.80
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,685,294,900.00	9,504,827,165.00	98,14	12,112,217,836.00
JUMLAH BELANJA MODAL	864,788,088,882.00	767,192,366,640.00	88,71	431,576,458,354.80

BELANJA TIDAK TERDUGA	15,000,000,000.00	1,064,700,000.00	7,10	7,533,312,919.00
Belanja Tidak Terduga	15,000,000,000.00	1,064,700,000.00	7,10	7,533,312,919.00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	15,000,000,000.00	1,064,700,000.00	7,10	7,533,312,919.00
BELANJA TRANSFER	414,010,777,372.00	414,010,777,372.00	100,00	412,205,252,067.00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	405,320,762,112.00	405,320,762,112.00	100,00	402,608,007,628.00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	414,010,777,372.00	414,010,777,372.00	100,00	412,205,252,067.00
JUMLAH BELANJA	3,244,413,657,771.00	2,860,522,415,801.33	88,17	2,406,930,642,146.49
SURPLUS/DEFISIT	(465,809,856,330.00)	546,698,603,281.94	(117,37)	332,507,576,824.47
PEMBIAYAAN DAERAH	465,809,856,330.00	465,809,856,331.46	100,00	239,974,229,636.99
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	572,481,806,462.00	572,481,806,461.46	100,00	265,057,479,765.99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	572,481,806,462.00	572,481,806,461.46	100,00	265,057,479,765.99
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	572,481,806,462.00	572,481,806,461.46	100,00	265,057,479,765.99
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	106,671,950,132.00	106,671,950,130.00	100,00	25,083,250,129.00
Pembentukan Dana Cadangan	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	30,393,434,000.00	30,393,434,000.00	100,00	18,804,734,000.00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	6,278,516,132.00	6,278,516,130.00	100,00	6,278,516,129.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	106,671,950,132.00	106,671,950,130.00	100,00	25,083,250,129.00
PEMBIAYAAN NETTO	465,809,856,330.00	465,809,856,331.46	100,00	239,974,229,636.99
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	1,012,508,459,613.40	0,00	572,481,806,461.46

3.5. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Adapun efisiensi penggunaan anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	APBD Induk		RKPD		Alasan Utama	
		Jumlah Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(7)	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program	7	761.734.347.909	Program	7	735.174.145.277
		Kegiatan	17		Kegiatan	18	
2.	Dinas Kesehatan	Program	5	318.388.305.232	Program	5	357.690.304.112
		Kegiatan	18		Kegiatan	19	
3.	RSUD HM Rabain	Program	2	138.545.468.745	Program	2	176.801.682.510
		Kegiatan	7		Kegiatan	7	
4.	Dinas PUPR	Program	12	224.289.940.567	Program	12	580.959.246.512
		Kegiatan	24		Kegiatan	25	
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program	8	56.421.102.335	Program	8	92.569.546.406
		Kegiatan	19		Kegiatan	20	
6.	Bappeda	Program	3	14.356.159.192	Program	3	15.600.142.174
		Kegiatan	14		Kegiatan	14	
7.	Dinas Perhubungan	Program	2	12.890.127.284	Program	3	15.699.173.075
		Kegiatan	14		Kegiatan	16	
8.	Dinas Lingkungan Hidup	Program	11	19.073.424.571	Program	11	19.969.667.495
		Kegiatan	22		Kegiatan	23	
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program	5	9.684.161.829	Program	5	11.237.191.151
		Kegiatan	13		Kegiatan	14	
10.	DPPA	Program	7	13.652.726.932	Program	7	14.862.440.893
		Kegiatan	18		Kegiatan	18	
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Program	4	20.272.815.140	Program	4	22.045.870.310
		Kegiatan	16		Kegiatan	16	
12.	Dinas Sosial	Program	6	19.041.272.383	Program	6	20.567.372.124
		Kegiatan	14		Kegiatan	14	
13.	Dinas Ketenagakerjaan	Program	5	8.358.594.785	Program	5	9.880.131.643
		Kegiatan	18		Kegiatan	18	
14.	Dinas Koperasi dan UKM	Program	7	9.371.781.118	Program	7	10.520.111.905
		Kegiatan	14		Kegiatan	14	
15.	DPMPTSP	Program	6	9.210.159.192	Program	6	10.807.087.263
		Kegiatan	14		Kegiatan	14	
16.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program	4	36.966.386.412	Program	4	38.965.758.542
		Kegiatan	13		Kegiatan	13	
17.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program	6	8.065.279.406	Program	6	9.582.396.283
		Kegiatan	13		Kegiatan	13	
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	Program	2	9.784.287.026	Program	2	12.463.060.544
		Kegiatan	11		Kegiatan	11	
19.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program	2	9.917.208.384	Program	2	10.249.764.404

No	Perangkat Daerah	APBD Induk		RKPD		Alasan Utama	
		Jumlah Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)		(5)		(7)	
		Kegiatan		Kegiatan			
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program	2	6.844.204.738	Program	2	7.742.814.130
		Kegiatan	11		Kegiatan	11	
21.	Sekretariat Daerah	Program	3	67.330.461.276	Program	3	78.272.236.581
		Kegiatan	19		Kegiatan	19	
22.	Sekretaris DPRD	Program	2	81.077.398.086	Program	2	77.714.189.415
		Kegiatan	12		Kegiatan	13	
23.	Inspektorat	Program	3	13.916.898.372	Program	3	14.868.197.161
		Kegiatan	11		Kegiatan	12	
24.	Bapenda	Program	2	23.864.380.241	Program	2	24.404.562.110
		Kegiatan	9		Kegiatan	9	
25.	BKPSDM	Program	3	18.935.757.033	Program	3	20.033.557.073
		Kegiatan	12		Kegiatan	12	
26.	BPKAD	Program	3	497.537.630.418	Program	3	523.524.853.125
		Kegiatan	12		Kegiatan	13	
27.	Balitbangda	Program	2	5.906.904.611	Program	2	6.381.064.391
		Kegiatan	11		Kegiatan	12	
28.	Kecamatan Semende Darat Ulu	Program	4	3.408.451.497	Program	4	3.513.016.383
		Kegiatan	11		Kegiatan	11	
29.	Kecamatan Semende Darat Tengah	Program	4	3.200.575.620	Program	4	3.226.392.255
		Kegiatan	12		Kegiatan	12	
30.	Kecamatan Semende Darat Laut	Program	4	3.047.227.702	Program	4	3.110.249.606
		Kegiatan	12		Kegiatan	12	
31.	Kecamatan Tanjung Agung	Program	4	3.883.913.513	Program	4	4.146.404.530
		Kegiatan	11		Kegiatan	11	
32.	Kecamatan Lawang Kidul	Program	4	7.093.453.195	Program	4	7.775.965.192
		Kegiatan	12		Kegiatan	12	
33.	Kecamatan Muara Enim	Program	4	13.068.439.352	Program	4	14.116.014.801
		Kegiatan	13		Kegiatan	13	
34.	Kecamatan Ujan Mas	Program	4	3.327.248.777	Program	4	3.055.042.473
		Kegiatan	10		Kegiatan	10	
35.	Kecamatan Benakat	Program	5	3.228.447.363	Program	5	3.307.657.365
		Kegiatan	13		Kegiatan	13	
36.	Kecamatan Gunung Megang	Program	4	3.584.659.624	Program	4	3.675.607.343
		Kegiatan	12		Kegiatan	12	
37.	Kecamatan Rambang Niru	Program	4	4.102.371.862	Program	4	4.185.837.910
		Kegiatan	11		Kegiatan	11	
38.	Kecamatan Lubai	Program	4	3.120.557.434	Program	4	3.172.943.088
		Kegiatan	12		Kegiatan	12	
39.	Kecamatan Rambang	Program	4	4.472.471.744	Program	4	4.800.128.757
		Kegiatan	11		Kegiatan	12	
40.	Kecamatan Lembak	Program	4	3.523.489.103	Program	4	3.593.472.157
		Kegiatan	10		Kegiatan	11	
41.	Kecamatan Kelekar	Program	4	2.900.506.539	Program	4	3.308.842.877
		Kegiatan	9		Kegiatan	10	

No	Perangkat Daerah	APBD Induk		RKPD		Alasan Utama	
		Jumlah Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
42.	Kecamatan Gelumbang	Program	4	5.181.551.277	Program	4	5.440.716.811
		Kegiatan	13		Kegiatan	13	
43.	Kecamatan Sungai Rotan	Program	4	4.338.649.541	Program	4	4.409.816.987
		Kegiatan	11		Kegiatan	12	
44.	Kecamatan Muara Belida	Program	4	2.898.746.369	Program	4	3.297.614.545
		Kegiatan	11		Kegiatan	11	
45.	Kecamatan Belimbing	Program	5	3.543.911.762	Program	5	3.631.633.117
		Kegiatan	13		Kegiatan	13	
46.	Kecamatan Belida Darat	Program	5	3.444.098.775	Program	5	3.694.312.401
		Kegiatan	12		Kegiatan	12	
47.	Kecamatan Lubai Ulu	Program	4	3.297.707.665	Program	4	3.594.120.796
		Kegiatan	11		Kegiatan	12	
48.	Kecamatan Empat Petulai Dangku	Program	4	3.002.465.332	Program	4	3.095.710.320
		Kegiatan	11		Kegiatan	11	
49.	Kecamatan Panang Enim	Program	4	3.174.095.859	Program	4	3.791.628.082
		Kegiatan	11		Kegiatan	11	
50.	Dinas Ketahanan Pangan	Program	5	13.558.681.880	Program	5	14.060.859.638
		Kegiatan	13		Kegiatan	13	
51.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program	5	32.095.539.079	Program	5	33.785.513.505
		Kegiatan	11		Kegiatan	12	
52.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program	5	18.261.791.135	Program	5	20.969.401.343
		Kegiatan	14		Kegiatan	14	
53.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program	4	9.633.102.076	Program	4	10.363.282.471
		Kegiatan	14		Kegiatan	14	
54.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Program	6	44.821.363.361	Program	6	48.236.104.117
		Kegiatan	18		Kegiatan	19	
55.	Dinas Perkebunan	Program	6	14.534.741.388	Program	6	17.430.844.326
		Kegiatan	16		Kegiatan	16	
56.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program	5	16.013.603.616	Program	5	17.357.474.817
		Kegiatan	16		Kegiatan	16	
57.	Dinas Perikanan	Program	4	10.019.229.896	Program	4	13.221.556.049
		Kegiatan	14		Kegiatan	14	
58.	Dinas Perdagangan	Program	7	20.224.165.117	Program	7	21.413.477.100
		Kegiatan	13		Kegiatan	14	
Total 262 program dan 770 kegiatan				2.685.442.440.670	Total 263 program dan 790 kegiatan		3.211.368.207.771
Total jumlah program kegiatan yang ditambah :							
1 program 20 kegiatan							
Total efisiensi anggaran :							
Rp. 525.925.767.101							

Sumber : Bappeda, 2023

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Muara Enim merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis pada RPJMD 2018 - 2023 yang dijabarkan ke dalam 7 misi, 3 tujuan, 15 sasaran, dengan 20 indikator kinerja utama dapat disimpulkan capaian indikator kinerja yaitu 5 indikator sasaran Sangat Baik, 13 indikator sasaran Baik, 1 indikator sasaran Cukup, 1 indikator sasaran Kurang. Rata – rata realisasi capaian kinerja mencapai 96,74 Persen atau bermakna **Baik**, Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 kategori **Baik**.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen atas dukungan yang diberikan dalam pencapaian kinerja tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja kedepannya secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pembangunan di Kabupaten Muara Enim terus kearah yang lebih baik.

LAMPIRAN





BUPATI MUARA ENIM


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurniawan, A.P., M.Si
Jabatan : Plh. Bupati Muara Enim

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Enim, Juni 2022
Plh. BUPATI MUARA ENIM,

KURNIAWAN, A.P., M.Si

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.	Indeks Pembangunan Manusia	69,32
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,32
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,00
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,40
4	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	Tingkat Daya Beli Masyarakat	Rp.10,95 juta
5	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,29
		Indeks Gini Ratio	0,31
		PDRB Perkapita	Rp.120 Juta
6	Menurunnya Masyarakat Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,92
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	B
8	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	B
		Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Terinovatif
9	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP
10	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur	57
11	Menguatnya Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	3,02
12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Penghargaan Pembangunan Daerah	Nominasi
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB
		Nilai LPPD	Prestasi Tinggi
14	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,95
15	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Harmonis	100

**PROGRAM PRIORITAS DAN ANGGARAN
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022**

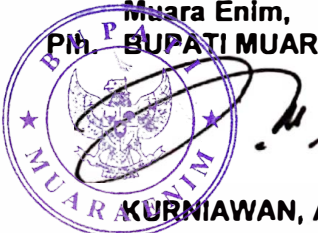
No.	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 155.393.724.299
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 33.453.338.276
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 153.693.007.401
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 17.399.392.321
5.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 812.957.898
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 601.013.359
7.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 50.274.078.545
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 6.575.397.249
9.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 7.951.297.656
10.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 13.098.220.840
11.	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 1.005.781.446
12.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 11.325.080.775
13.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 470.377.974
14.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 190.502.306.490
15.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 239.367.446
16.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 5.169.802.992
17.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 3.600.564.336
18.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 14.929.088.626
19.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Rp. 25.736.336.873
20.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 5.997.674.483
21.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 3.257.873.788
22.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 4.564.548.923
23.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 12.336.741.922
24.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 883.788.456
25.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 1.001.186.728
26.	Program Penanganan Bencana	Rp. 695.920.642
27.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 105.625.452
28.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 105.848.215
29.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2.392.303.232
30.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 476.348.825
31.	Program Hubungan Industrial	Rp. 359.960.886
32.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 454.026.173
33.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 169.888.108
34.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 72.158.610
35.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 259.195.360
36.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 712.162.260

No.	Program	Anggaran (Rp.)
37.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 339.237.603
38.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 1.072.073.396
39.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 2.681.542.972
40.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 465.264.383
41.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 316.769.648
42.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 207.359.388
43.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 10.237.366.298
44.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp. 44.421.635
45.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 76.331.873
46.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 514.086.272
47.	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.283.356.202
48.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 312.943.900
49.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 147.048.930
50.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 178.874.606
51.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Rp. 63.412.300
52.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 228.386.400
53.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 227.713.600
54.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 190.154.362
55.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 5.500.347.926
56.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.351.868.234
57.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 518.229.500
58.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 595.462.642
59.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 187.722.000
60.	Program Penataan Desa	Rp. 13.632.638.264
61.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 220.269.440
62.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 4.220.107.220
63.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 4.051.154.313
64.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 1.043.100.381
65.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.391.373.148
66.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.373.164.564
67.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 3.650.349.738
68.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	8.371.031.632
69.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 4.820.139.833
70.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 76.309.000

No.	Program	Anggaran (Rp.)
71.	Program Penilaian Kesehatan ksp/ usp Koperasi	Rp. 80.060.300
72.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 594.198.802
73.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 1.476.513.672
74.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.490.249.009
75.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 887.559.604
76.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.142.803.868
77.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 857.014.007
78.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 885.915.225
79.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 403.427.283
80.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 683.900.061
81.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 4.574.980.849
82.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 11.632.791.614
83.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 560.987.688
84.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 265.945.291
85.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 316.355.294
86.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 525.000.000
87.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 650.000.000
88.	Program Pembinaan Sejarah	Rp. 175.000.000
89.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 365.000.000
90.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1.930.184.113
91.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 111.483.786
92.	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 559.647.454
93.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 718.125.548
94.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 2.981.866.736
95.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.435.046.901
96.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 1.601.500.000
97.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 505.000.000
98.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 595.000.000
99.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 485.000.000
100.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 10.188.942.680
101.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.824.515.007
102.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 1.189.769.505
103.	Program Pengendalian an Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 593.074.575
104.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 67.127.285
105.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 4.496.020.795
106.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp. 296.338.811
107.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 9.652.096.547

No.	Program	Anggaran (Rp.)
108.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 684.420.695
109.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 250.000.000
110.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 302.141.000
111.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 297.859.000
112.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 14.689.088.118
113.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 5.195.977.239
114.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 32.839.612.565
115.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.893.431.424
116.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.286.705.178
117.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 440.808.352.499
118.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 4.204.054.616
119.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.673.294.852
120.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 5.508.493.710
121.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 6.793.886.313
122.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 2.711.579.360
123.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.329.764.690
124.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 458.855.754
125.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 7.793.745.553
126.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 9.478.636.493
127.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 133.020.908
128.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 2.599.462.286
129.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 282.777.403
130.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.987.268.244
131.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.005.145.882
132.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 612.777.009
133.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 907.533.221

Jumlah program sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) program dan anggaran : Rp. 1.426.192.324.790,- (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Muara Enim, Juni 2022
 P.H. BUPATI MUARA ENIM,

 KURNIAWAN, A.P., M.Si

PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2022

1. Peraih nilai tertinggi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) se-Provinsi Sumatera Selatan 2021 dengan predikat BB 'Sangat Baik' dari Kemen-PANRB RI.
2. Peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 Kali berturut-turut Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK RI.
3. Pembina Proklamasi Tingkat Nasional 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Piala Nirwasita Tantra 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kepala Daerah Terbaik dalam Pembinaan dan Penerapan Kebijakan Lingkungan Hidup dari Gubernur Sumatera Selatan.
5. Top Leader Implementation Tahun 2022.
6. Sertifikat Kabupaten Bebas Frambusia untuk Kabupaten Muara Enim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
7. Penghargaan Pemerintah Kabupaten/kota Terbaik Sumatera Selatan dalam penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah 2021 dari Gubernur Sumatera Selatan.
8. Peringkat 1 Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik dalam Festival Literasi Provinsi Sumatera Selatan 2022.
9. Piala Anggara Birawa untuk Kabupaten Muara Enim sebagai Pemerintah Daerah Terbaik di Indonesia dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (KP4) Tahun 2022 dari Kemen-PANRB RI.
10. Top Digital Implementation Tahun 2022.
11. Terbaik I di Provinsi Sumatera Selatan dalam Berkomitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelaporan Berbasis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2022.
12. Penganugerahan Predikat Nindya Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2022.
13. Peraih Predikat Anjungan Terfavorit pada Festival Anjungan Sumatera Selatan.
14. Peraih Stand Terbaik II pada Sriwijaya Expo Tahun 2022
15. Penerima Penghargaan Siddhakarya sebagai Pembina Produktivitas di PT. Kirana Permata.